



EDUKASI KONSUMEN

EDISI SEPTEMBER 2025

sikapiuangmu.ojk.go.id



Kampanye Nasional
Berantas Scam dan Aktivitas
Keuangan Ilegal

OJK Gelar Hari Indonesia
Menabung dan Bulan Literasi
Keuangan 2025

LIKE IT 2025, Generasi
Muda Cerdas Keuangan
Menuju Indonesia Emas

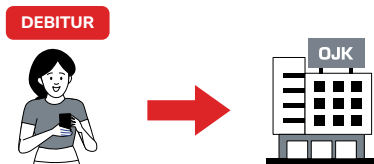
**KOLABORASI OJK DAN STAKEHOLDERS
PERKUAT LITERASI KEUANGAN DAN
PELINDUNGAN KONSUMEN**

PANDUAN SINGKAT

Tata Cara Permintaan Informasi Debitur Secara Tatap Muka

A Debitur datang ke OJK*

Membawa dokumen pendukung dan mengisi formulir permintaan informasi debitur melalui laman web <https://idebku.ojk.go.id>



B OJK melakukan pengecekan kesesuaian formulir dan dokumen pendukung

Apabila telah sesuai dengan persyaratan, OJK melakukan penarikan data informasi debitur



C Hasil akan dikirimkan melalui email pemohon yang didaftarkan

*Kantor Pusat dan Kantor OJK Daerah Pelaksana layanan iDebku OJK

Permintaan informasi debitur antara lain:

1. Debitur perseorangan:

Fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli berupa:

- KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA
- Dalam hal dikuasakan, membawa surat kuasa, dan identitas diri asli pemohon

2. Debitur yang telah meninggal dunia:

Fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli berupa:

- Identitas ahli waris (KTP untuk WNI, Paspor untuk WNA)
- Dokumen asli yang menerangkan kematian debitur yang dikeluarkan oleh pihak berwenang; dan
- Dokumen yang menunjukkan hubungan kekeluargaan/ahli waris

3. Debitur badan usaha:

Fotokopi identitas badan usaha dan identitas pengurus dengan menunjukkan identitas asli badan usaha berupa:

- KTP pengurus badan usaha
- NPWP badan usaha
- Akta pendirian badan usaha
- Perubahan anggaran dasar terakhir badan usaha
- Dalam hal dikuasakan, membawa surat kuasa, dan identitas asli pemohon

Pengaduan dan pertanyaan lebih lanjut terkait iDeb, dapat menghubungi Kontak OJK 157 melalui:

Telepon: 157

Email: konsumen@ojk.go.id

Whatsapp: 081-157-157-157

5 Kabar Otoritas

Kegiatan GENCARKAN Menyapa Masyarakat Tegal dan Mahasiswa Bali

- 20 Edu Perbankan
Dampak Penurunan BI Rate terhadap Ekonomi Indonesia
- 22 Edu Invest
Mengenal Kontrak Investasi Kolektif
- 24 Edu IKNB
Perbedaan Pendanaan dari Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura
- 26 Edu Syariah
SYAFIF 2025 Goes to Bandung
- 28 Edu Tech
QRIS Tap: Transaksi Keuangan Cepat dan Praktis
- 32 Sosok
Komjen Pol. (Purn.) Drs. Budi Waseso
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Wujudkan Pramuka Mandiri Finansial
- 34 Regulasi
Atur Mitra Pemasaran, OJK Terbitkan POJK No.13/2025
- 36 Bisnis Pemula
Layanan Konsultasi UMKM dari Lembaga Jasa Keuangan
- 38 Investasi
Investasi Obligasi: Buat Investor yang Cari Passive Income
- 40 Konsumen Bicara
OJK Terima Pertanyaan Legalitas Aset Kripto dan Kredit Usaha Rakyat
- 41 Telaah Produk
Mengenal Aset Kripto
- 43 Angka Bicara
Kinerja Satgas PASTI Semester I/2025
- 44 Inspirasi
Tingkatkan Perkembangan Usaha Mikro, Pemerintah Sediakan Program Pembiayaannya
- 46 Wacana
Fenomena Rojali dan Rohana: Ketika Belanja Cuma Sekadar Wacana
- 48 Literasi Keuanganpedia
Buku The Psychology of Money, Ini Bukan Sekadar Soal Uang!
- 49 Kuis Sikapi Uangmu
- 50 Silam Kini
Menilik Masuknya Dana Pensiun di Indonesia

6 Sorotan Utama I

Kampanye Nasional Berantas Scam dan Aktivitas Keuangan Ilegal

OJK bersama pemangku kepentingan berkolaborasi untuk memperkuat peran IASC dalam memberantas kasus penipuan dan aktivitas keuangan ilegal yang semakin marak dan masif.



10 Sorotan Utama II

OJK Gelar Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan 2025

Kolaborasi OJK dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi keuangan sejak dini melalui peringatan Hari Indonesia Menabung dan Puncak Bulan Literasi Keuangan 2025.

14 Sorotan Utama III

LIKE IT 2025, Generasi Muda Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas

OJK, BI, LPS, FK-PPPK, dan Kwarnas Pramuka bersinergi melatih generasi muda untuk terampil mengelola keuangan agar menjadi generasi yang mandiri secara finansial, dalam kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) 2025.



18 Perspektif

Cetak Prestasi, Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2025 Naik 5,12%



30 Fokus Global

Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Indonesia Tunjukkan Perannya di ASEAN Treasury Forum



Meraih Indonesia Emas, OJK Terus Bangun Generasi Muda Cerdas Keuangan

Untuk mewujudkan Indonesia Emas, OJK terus membangun Generasi Muda Cerdas Keuangan di segala lini.

Untuk meraih Indonesia Emas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan serangkaian kegiatan untuk membangun Generasi Muda Cerdas Keuangan. Pada 14 Agustus 2025 OJK melaksanakan kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) 2025 yang berlangsung di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Acara yang diselenggarakan OJK bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengajak para Pramuka Berkebutuhan Khusus untuk menjadi generasi yang mandiri secara finansial.

LIKE IT merupakan kerjasama strategis empat lembaga keuangan negara untuk meningkatkan literasi keuangan, sekaligus memperluas basis investor ritel serta menyiapkan generasi muda yang cerdas keuangan. Program ini sejalan dengan Asta Cita pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. "Literasi keuangan menjadi fondasi penting bagi generasi muda Indonesia untuk tumbuh menjadi SDM unggul, produktif, dan siap menghadapi tantangan global," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi.

Acara yang digelar oleh Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) ini menjadi bagian dari rangkaian Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus Nasional (PPBK Nas) 2025. Kegiatan ini dihadiri sekitar 3.000 peserta Pramuka Tingkat Penegak dan Pandega, termasuk pelajar penyandang disabilitas, yang menjadi sasaran prioritas edukasi keuangan berdasarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021–2025.

Pada 22 Agustus 2025 OJK menyelenggarakan acara Puncak Hari Indonesia Menabung (HIM) dan Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2025 di Gedung Dhanapala, Jakarta. Kegiatan bertema CEMERLANG: Cerdas Menabung untuk Indonesia Emas dan Gemilang ini merupakan momentum penting untuk mendorong budaya menabung sejak dini serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Acara ini dihadiri oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK Mirza Adityaswara, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi yang juga menjadi pembicara dalam sesi *Leader's Insight*. Kenurut Friderica peringatan HIM merupakan bagian dari dukungan OJK terhadap program Asta Cita Pemerintah dalam menyiapkan Generasi Emas 2045.

Dari Bulan Mei s.d Agustus 2025, OJK telah menyelenggarakan Bulan Literasi Keuangan (BLK) yang merupakan bagian dari program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dalam rangka meningkatkan literasi keuangan secara masif dan merata. Berbagai kegiatan edukatif telah sukses dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Serangkaian kegiatan tersebut sejalan dengan Asta Cita pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Literasi keuangan menjadi fondasi penting bagi generasi muda Indonesia untuk tumbuh menjadi SDM unggul, produktif, dan siap menghadapi tantangan global.

SUSUNAN REDAKSI

DEWAN PELINDUNG:

Mahendra Siregar
(Ketua Dewan Komisiner OJK)

DEWAN PENASEHAT:

Friderica Widyasari Dewi (Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen), Rizal Ramadhani (Deputi Komisiner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen)

PEMIMPIN UMUM /PEMIMPIN REDAKSI:

Mohammad Ismail Riyadi (Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi), Rudy Agus P. Raharjo (Kepala Departemen Pelindungan Konsumen)

REDAKTUR AHLI:

Cecep Setiawan (Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan), Sekar Putih Djarot (Kepala Grup Komunikasi Publik); Sabar Wahyono (Direktur Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan dan EPK Regional), Rony Ukurta Baru (Direktur Inklusi Keuangan), Tri Herdianto (Direktur Pembelaan Hukum Pelindungan Konsumen), Reli Ginting (Direktur Penelitian Kebijakan dan Pengaturan EPK),

REDAKTUR:

Cecep Setiawan (Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan)

REDAKSI:

Anggota Tim Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan

ALAMAT REDAKSI:

Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK
Jl. Lap. Banteng Timur No. 2-4,
Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10710
Telepon: (021) 29600000
Faksimili: (021) 3866032
Website: www.ojk.go.id.

Majalah Edukasi Konsumen dapat diunduh pada *minisite* OJK: sikapiuangmu.ojk.go.id


Kegiatan GENCARKAN Menyapa Masyarakat Tegal dan Mahasiswa Bali

Dalam rangka peningkatan literasi keuangan secara masif dan merata. Melalui program GENCARKAN, OJK menggelar kegiatan edukasi keuangan untuk pelaku UMKM di Tegal dan para mahasiswa PNB Bali.

daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Pada bulan Agustus 2025, OJK menggelar kegiatan literasi dan inklusi keuangan untuk masyarakat Tegal khususnya pelaku UMKM melalui kegiatan Digital Financial Literacy.

Kegiatan tersebut dilandasi maraknya penipuan digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi, sehingga diperlukan peran aktif masyarakat dalam membekali diri. Pelaku UMKM diajak untuk beradaptasi dengan teknologi, seperti penggunaan *e-wallet*, pencatatan keuangan digital, hingga pemasaran melalui platform *e-commerce*.

OJK juga menyelenggarakan kegiatan GENCARKAN di Bali yang membidik muda kalangan mahasiswa di Politeknik Negeri Bali (PNB). Bekerja sama dengan Bank BPD Bali, OJK mengajak para mahasiswa untuk melek keuangan dengan mengikuti acara *ngobrol-ngobrol* santai bertajuk "Ngopi Kuy!" (Ngobrol Pintar Seputar Keuangan Yuk). Dalam acara tersebut, mahasiswa dibekali materi keuangan terkini agar menjadi generasi muda yang cerdas keuangan dengan masa depan yang sejahtera.

 OJK melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang diluncurkan sejak Agustus 2024 silam, terus menggalakkan kegiatannya mengedukasi masyarakat. Gerakan ini bertujuan mencerdaskan masyarakat agar dapat mengambil keputusan finansial yang tepat, terhindar dari kejahatan finansial, dan mencapai kemerdekaan finansial menuju Indonesia Emas 2045.

Targetnya adalah para pelajar, pemuda/mahasiswa, pelaku UMKM, penyandang disabilitas, dan masyarakat di



Kampanye Nasional Berantas *Scam* dan Aktivitas Keuangan Ilegal



OJK bersama pemangku kepentingan berkolaborasi untuk memperkuat peran IASC dalam memberantas kasus penipuan dan aktivitas keuangan ilegal yang semakin marak dan masif.

Kemajuan digitalisasi keuangan seolah seperti pisau bermata dua yang memiliki dua sisi positif dan negatif. Sisi positif berupa peningkatan inklusi keuangan, efisiensi transaksi, serta pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan akses layanan dan transaksi non-tunai. Namun, ada juga dampak negatif yang meliputi risiko keamanan data dan privasi, potensi penipuan, dan risiko kesenjangan digital di antara masyarakat yang kurang terliterasi teknologi.

Kenyataannya, yang paling tersorot adalah dampak negatif dari digitalisasi keuangan. Korbannya tentu saja masyarakat, terutama mereka yang minim pengetahuan tentang keuangan digital. Kerugian masyarakat akibat penipuan, khususnya penipuan keuangan di Indonesia, sangat signifikan dan terus meningkat. Data terbaru mencatat kerugian sudah mencapai Rp4,6 triliun untuk laporan di kuartal I 2025 dan Rp142,13 triliun secara total dari 2017 hingga kuartal I 2025 untuk investasi ilegal saja. Kerugian ini tidak hanya berupa uang, tetapi juga mencakup dampak psikologis seperti trauma dan hilangnya peluang bagi korban.

Modus penipuan terbanyak adalah penipuan transaksi belanja *online*, penipuan investasi (termasuk investasi bodong), dan penipuan yang mengaku pihak lain (seperti *fake call/impersonation* dan *phishing*). Modus lain yang juga marak adalah penipuan penawaran kerja fiktif, penipuan hadiah, dan *love scam*.

Tentu kita pernah mendengar kehebohan kasus penipuan seperti kasus Pandawa Group, kasus First Travel, *trading* gadungan Indra Kenz dan Doni Salmanan, kasus investasi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, dan kasus-kasus penipuan lainnya yang menggemparkan masyarakat. Pelaku menggunakan trik yang semakin canggih sehingga sering kali korban tidak menyadari adanya penipuan.

Banyak korban yang sudah rugi besar, dari jutaan hingga triliunan rupiah, makin terbebani karena terlambat melapor atau tidak tahu prosedurnya. "Dibandingkan negara-negara tetangga, jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak menjadi tantangan tersendiri. Angka *scam*-nya tinggi dan banyak masyarakat belum tahu caranya mengadu," kata Kepala Eksekutif pengawas perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan



Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi.

OJK sebagai regulator tidak mungkin tinggal diam menyaksikan maraknya kasus *scam* dan aktivitas keuangan ilegal yang meliputi investasi bodong, pinjaman *online* ilegal, judi *online*, dan pencucian uang. Selain memperketat regulasi untuk dapat menindak pelakunya, OJK juga melindungi kepentingan korban (konsumen).

Alasan itulah yang mendorong OJK membentuk lembaga khusus bernama *Indonesia Anti Scam Centre* (IASC) yang menangani pelaporan penipuan yang dialami masyarakat. Selain memudahkan bagi pelapor, sistem yang diterapkan oleh lembaga ini juga cepat menangani pelaporan tersebut. Sejak berdiri pada November 2024 hingga 17 Agustus 2025, IASC telah menerima 225.281 laporan dengan total

kerugian dana yang dilaporkan sebesar Rp4,6 triliun. Sementara total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp349,3 miliar. Adapun jumlah rekening yang dilaporkan mencapai 359.733. Kemudian berjumlah 72.145 rekening diblokir pada periode yang sama.

OJK tidak sendirian menghadapi berbagai kasus penipuan di negeri ini. Dibantu oleh pemangku kepentingan terkait Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), dan pemangku kepentingan lainnya, OJK meluncurkan Kampanye Nasional *Berantas Scam* dan Aktivitas Keuangan Ilegal yang bertujuan memperkuat tugas IASC dalam memberantas kasus penipuan di Indonesia.

Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar mengatakan



kampanye ini menjadi bagian dari kerja besar yang dijalankan oleh Satgas PASTI yang kini memiliki landasan hukum kuat melalui Pasal 247 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Mahendra menyebutkan ada tiga tujuan utama peluncuran kampanye ini. Pertama, menegaskan komitmen bersama seluruh anggota Satgas Pasti dalam memberantas penipuan dan aktivitas keuangan ilegal. Kedua, meningkatkan kolaborasi lintas otoritas, lembaga, dan pelaku industri jasa keuangan dalam menangani laporan scam. Ketiga, membangun kesadaran publik melalui edukasi masif, terstruktur, dan berkelanjutan dengan melibatkan platform digital global seperti Meta, Google, dan TikTok.

OJK juga mengoptimalkan berbagai media, mulai dari aplikasi mobile banking

hingga ATM di seluruh Indonesia, sebagai sarana penyampaian pesan edukatif kepada masyarakat secara langsung. "Ancaman scam bukan lagi persoalan individu, tapi sudah menjadi ancaman sistemik terhadap kepercayaan publik pada sektor jasa keuangan dan lembaga pengawas. Untuk itu, diperlukan langkah kolektif dan kampanye yang masif," pungkas Mahendra.

Dengan keberadaan IASC saat ini masyarakat bisa bergerak cepat melaporkan kasus penipuan untuk mempercepat penanganannya. "Jika terlambat, transaksi dan perpindahan dana sudah berjalan sangat cepat. Karena itu, laporan korban sangat penting untuk pelacakan. BSSN akan terus membantu bersama Komdigi dalam melacak akun-akun dan URL yang digunakan pelaku scam," ujar Kepala BSSN Letjen (Purn) Nugroho

Sulistyo Budi mengimbau masyarakat.

Hal senada turut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid. Menurutnya, IASC akan dapat menjalankan fungsinya secara maksimal bila kolaborasi pemangku kepentingan betul-betul kuat antara pemerintah, industri fintech, lembaga keuangan, dan media. "Kami tidak mampu bekerja sendirian, perlu didukung industri dan disosialisasikan oleh media. Masyarakat juga perlu waspada terhadap penipuan dengan melindungi diri sendiri di ruang digital. Kalau ada yang terkena scam, tolong segera melapor. Sesuai arahan Presiden, kami akan berkolaborasi dan menangani dengan cepat," tutur Meutya.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang merupakan pemangku kepentingan yang tergabung dalam Satgas PASTI menyatakan akan ikut mengawasi pendanaan terorisme yang kerap memanfaatkan aktivitas keuangan ilegal. "Dengan bergabung di Satgas PASTI, mitigasi dapat lebih kuat. Kampanye Nasional Berantas Scam ini juga memudahkan langkah kita. Hal ini mendukung Asta Cita Presiden sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2021-2029," kata Kepala BNPT Komjen Pol. (Purn) Eddy Hartono.

Kinerja IASC Bersama Satgas Pasti

IASC adalah pusat koordinasi yang dibentuk OJK bersama kementerian dan lembaga terkait dalam Satgas PASTI untuk menangani laporan penipuan keuangan secara cepat dan efektif. Satgas PASTI sendiri terdiri dari 21 kementerian/lembaga, yaitu OJK, Bank Indonesia, Kemendagri, Kemenlu, Kemenag, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kemenkum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemensos, Kemendag, Komdigi, Kemenkop,

Kementerian UMKM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, BSSN, BNPT, Kejaksaan Agung, Kepolisian, BIN dan PPATK. Melalui kampanye ini, semua pemangku kepentingan berkomitmen kolektif untuk memperkuat perlindungan konsumen, yang diwujudkan melalui empat langkah utama pencegahan melalui literasi dan kampanye masif, percepatan penanganan laporan dengan *strategi co-location* di IASC, penegakan hukum melalui koordinasi antar lembaga serta kolaborasi internasional untuk menghadapi kejahatan keuangan lintas negara.

Satgas PASTI didirikan pada tanggal 30 November 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 1/KDK.08/2023, dan merupakan kelanjutan dari Satgas Waspada Investasi yang sudah aktif sejak 2007. Fungsi utamanya untuk memberantas aktivitas keuangan ilegal, diperkuat oleh eksistensi IASC sebagai pusat nasional pengaduan dan penanganan kasus penipuan (*scam*) di sektor keuangan. Kolaborasi keduanya diharapkan dapat memberantas aktivitas *scam* yang sudah melibatkan infrastruktur komunikasi yang masif.

Tercatat ada 2.422 nomor telepon yang teridentifikasi terkait aktivitas keuangan ilegal, serta 22.993 nomor telepon yang dilaporkan korban *scam* dan telah diblokir. Jika dilihat dari tren kerugian akibat investasi ilegal sejak 2017 hingga triwulan II 2025, nilainya terus meningkat signifikan. Dari Rp 4,4 triliun pada 2017 angka ini melonjak hingga mencapai Rp12,13 triliun pada 2025.

Setiap hari, rata-rata terdapat 700–800 laporan masuk, jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain, seperti Singapura (140), Hong Kong (124), dan Malaysia (130). Modus penipuan pun semakin beragam, dengan dana korban dialihkan melalui berbagai format, mulai dari rekening bank, virtual *account*,



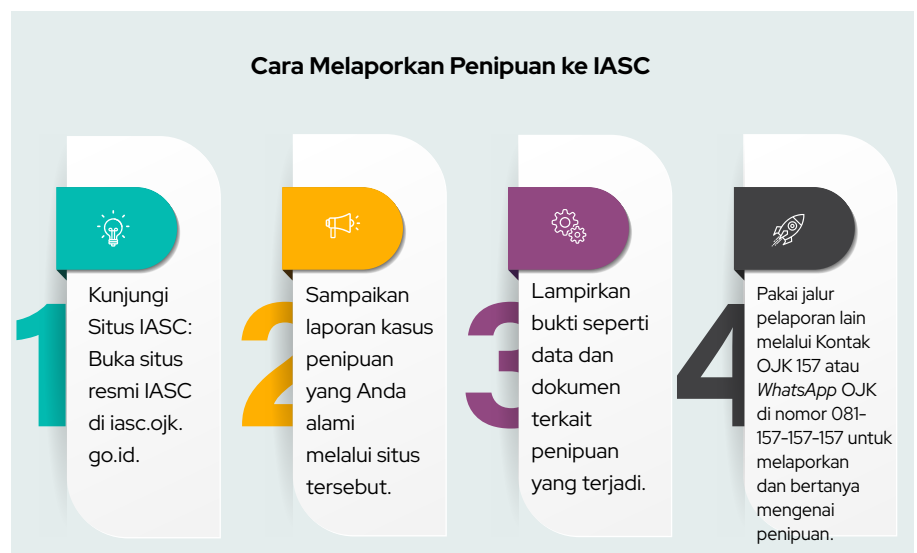
e-commerce, *e-wallet*, hingga aset kripto.

IASC selama ini menampung laporan dari masyarakat yang sudah menjadi nasabah lembaga keuangan resmi berizin, namun tetap tertipu oleh modus penipuan, seperti *love scam*, tawaran pekerjaan palsu, maupun transfer keliru. Bahkan nasabah bank resmi yang berizin OJK pun bisa jadi korban *scam*.

Selain itu, Satgas PASTI telah menghentikan 1.840 entitas keuangan

ilegal, terdiri atas 1.556 pinjaman *online* ilegal dan 284 investasi ilegal. Hingga kini, terdapat 11.137 pengaduan, dengan rincian 8.929 terkait pinjol ilegal dan 2.208 terkait investasi ilegal.

Bagi masyarakat yang hendak melaporkan kasus penipuan (*scam*) di sektor keuangan, bisa menghubungi IASC melalui situs iasc.ojk.go.id, Kontak OJK di nomor 157, atau melalui aplikasi perpesanan *WhatsApp* di nomor 081-157-157-157.





OJK Gelar Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan 2025

Kolaborasi OJK dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi keuangan sejak dini melalui peringatan Hari Indonesia Menabung dan Puncak Bulan Literasi Keuangan 2025.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan kegiatan Puncak Hari Indonesia Menabung (HIM) dan Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2025 di Gedung Dhanapala Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 22 Agustus 2025. Kegiatan dengan tema CEMERLANG: Cerdas Menabung untuk Indonesia Emas dan Gemilang ini menjadi momentum penting untuk mendorong budaya menabung sejak dini serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi yang sekaligus menjadi pembicara dalam sesi *Leader's Insight*. Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh Kepala OJK Daerah, Kepala Daerah penerima penghargaan, serta pimpinan dan asosiasi industri jasa keuangan.

Airlangga Hartarto, yang juga selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), menekankan pentingnya kebiasaan menabung sejak dini untuk mengantisipasi kebutuhan yang mendadak di masa depan. "Adik-adik untuk mengurangi ketergantungan kepada orang tua. Jadi biasanya kalau mau sesuatu kita minta uang orang tua, tetapi kalau sudah punya tabungan kita punya independensi untuk membelanjakan tanpa perlu minta izin orang tua," kata Airlangga.

Senada dengan itu, Mirza Adityaswara menyampaikan bahwa

“

Kami mencatat tingkat literasi keuangan nasional meningkat menjadi 66,46% pada 2025, dari pencapaian pada 2024 yang sebesar 65,43%. Dan, indeks inklusi keuangan nasional meningkat menjadi 80,51% pada 2025, dari 75,02% pada 2024, kata Friderica.

menabung bukan hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga menjadi sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. "Mulailah menabung sejak kecil, berapapun jumlahnya. Tabungan masyarakat inilah yang menjadi sumber dana untuk membiayai perusahaan, lapangan kerja, dan pembangunan Indonesia. Dulu kami menabung melalui Tabungan Pelajar. Sekarang generasi muda bisa lebih mudah menabung dengan SimPel, tapi pesannya tetap sama: biasakan menabung sejak dini," jelas Mirza.

Sementara itu, Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa peringatan

HIM juga merupakan bagian dari dukungan OJK terhadap program Asta Cita Pemerintah dalam menyiapkan generasi emas 2045. "Pelajar boleh membeli kebutuhan atau keinginan, asalkan dengan uang hasil menabung, bukan dari berutang. Hati-hati dengan pinjaman *online* ilegal dan budaya konsumtif hanya untuk gaya-gayaan, karena itu berbahaya bagi masa depan anak muda," pesan Friderica.

Melalui Program KEJAR yang terdiri dari Simpanan Pelajar (SimPel) dan Tabungan Anak, hampir 88% pelajar Indonesia atau sebanyak 58,32 juta pelajar telah memiliki rekening



tabungan, dengan total nilai tabungan lebih dari Rp34 triliun.

Selama periode HIM tahun 2025, yaitu pada 1 Juli sampai dengan 10 Agustus 2025, tercatat telah dibuka 263.109 rekening pelajar baru dengan total nominal tabungan mencapai Rp338,6 miliar. Selain itu, sebanyak 4.283 kegiatan sosialisasi berhasil diselenggarakan dan melibatkan 334.540 peserta, mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, hingga orang tua. Termasuk program *Bank Goes to School* yang telah diselenggarakan lebih

dari 120 ribu kegiatan di lebih dari 101 ribu sekolah di seluruh Indonesia.

Capaian ini menunjukkan tingginya komitmen bersama dalam memperluas akses keuangan sekaligus meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya menabung untuk membangun kemandirian finansial di masa depan.

Bulan Literasi Keuangan (BLK)

BLK merupakan bagian dari program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dalam rangka

peningkatan literasi keuangan secara masif dan merata selama bulan Mei sampai Agustus 2025. Berbagai kegiatan edukatif telah sukses dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Rangkaian Literasi Keuangan, yaitu:

Selama periode bulan Mei sampai Agustus 2025, telah terselenggara *Kick Off* BLK di 81 Kabupaten/Kota dan 19 Provinsi, *Financial Literacy Series* sebanyak 7.293 kegiatan di 415 Kabupaten/Kota dan publikasi 4.225 konten *Financial Literacy Campaign* yang menjangkau lebih dari 100 juta viewers.



Sebagai bagian dari puncak kegiatan, OJK turut menyelenggarakan penganugerahan Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) *Award* dan *Financial Literacy Award*. KEJAR *Award* diberikan kepada industri perbankan, satuan pendidikan, dan pemerintah daerah yang aktif mendukung implementasi KEJAR melalui pembukaan rekening, publikasi, sosialisasi, maupun edukasi.

Sementara itu, *Financial Literacy Award* merupakan bentuk apresiasi kepada para pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), *stakeholders*, pemerintah daerah, duta literasi keuangan, dan komunitas yang telah berperan dalam mendorong peningkatan literasi keuangan yang masif dan merata. Kedua penghargaan ini diharapkan dapat memacu semangat kolaborasi yang lebih luas dalam membentuk ekosistem keuangan yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan.

Berikut adalah daftar penerima apresiasi:

Financial Literacy Award

1. Kategori PUJK dengan Program Literasi Keuangan Terbaik:
 - PT Bank Central Asia TBK
 - PT Pegadaian
 - PT BPD Jawa Tengah
 - PT Bank Syariah Indonesia TBK
2. Kategori PUJK dengan Program Literasi Keuangan Teraktif:
 - PT Bank Mandiri (Persero) TBK
 - PT BPR Hasa Mitra
 - PT Pegadaian
 - PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
 - PT Sucor Sekuritas
 - PT Asuransi Allianz Life Indonesia
 - PT Bank Aceh Syariah
3. Kategori PUJK dengan Pembentukan OJK PEDULI Termasuk:
 - PT Bank Mandiri (Persero) TBK
 - PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK
 - PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
 - PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
4. Kategori Pemerintah Daerah dengan Program Literasi Keuangan Terbaik:

Tingkat Provinsi: Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Tingkat Kota: Pemerintah Kota Bandung

Tingkat Kabupaten: Pemerintah Kabupaten Maros

5. Kategori OJK PEDULI:

Kategori OJK PEDULI KOD Terbaik:

Lolita Setyawati

Kategori OJK PEDULI KOD Terbaik:

Tri Ivan Darmawan

Kategori OJK PEDULI KOD Terbaik:

Khusnul Khotimah

Kategori OJK PEDULI PUJK Terbaik:

Kristiana Susanti

Kategori OJK PEDULI PUJK Terbaik:

Serly

Kategori OJK PEDULI PUJK Terbaik:

Magfirah Puti G

Kategori OJK PEDULI PUJK Terbaik:

M. Charles Nur O

Kategori OJK PEDULI Segmen

Prioritas Terbaik: Muhammad Rizky

Kategori OJK PEDULI Segmen

Prioritas Terbaik: Andrau Boston T

Kategori OJK PEDULI Segmen

Prioritas Terbaik: Anggia Ayu L

Kategori OJK PEDULI Segmen

Prioritas Terbaik: Nurdessy Nirmala

KEJAR Award

1. Kategori Bank Implementasi KEJAR Terbaik:
 - Subkategori BUMN: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - Subkategori Bank Umum Konvensional: PT Bank Central Asia Tbk.
 - Subkategori Bank Umum Syariah: PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
 - Subkategori Bank Pembangunan Daerah: PT Bank DKI
 - Subkategori BPR/BPRS Wilayah Barat: PT BPR Gema Pesisir Provinsi Sumatera Barat
 - Subkategori BPR/BPRS Wilayah Tengah: PT BPRS Bhakti Sumekar Perseroda Provinsi Jawa Timur
 - Subkategori BPR/BPRS Wilayah Timur: PT BPR Hasamitra Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bank Pencapaian KEJAR Terbaik

dalam Rangka Hari Indonesia Menabung

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

3. Bank Teraktif dalam Pelaksanaan *Bank Goes to School*
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.
4. Satuan Pendidikan Implementasi KEJAR Terbaik
Subkategori Umum: SMK Negeri 1 Saptosari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mitra kerja sama Bank BPD DIY
Sub kategori Berbasis Agama: MTsN 3 Malang Provinsi Jawa Timur dengan mitra kerja sama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Subkategori Sekolah Luar Biasa: SLB Negeri 01 Sungai Pagu Provinsi Sumatera Barat dengan mitra kerjasama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
5. Wilayah Implementasi KEJAR Terbaik
Subkategori Provinsi: Provinsi DKI Jakarta
Subkategori Kabupaten/Kota: Kota Denpasar

Pemenang Video Competition kategori Video Jingle

- PT Bank Central Asia
- PT BPD Bali
- PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)

Pemenang Video Competition kategori Video Pendek

- PT BPD Bali
- Bank Sahabat Sampoerna
- Pilarmas Investindo Sekuritas

Melalui peringatan Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan 2025, OJK berharap budaya menabung dapat semakin mengakar di kalangan pelajar dan mahasiswa, sekaligus memperkuat kolaborasi antar-*stakeholder* dalam mewujudkan literasi dan inklusi keuangan yang bermakna. Upaya ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana generasi muda yang cerdas secara finansial akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



LIKE IT 2025, Generasi Muda Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas

OJK, BI, LPS, FK-PPPK, dan Kwarnas Pramuka bersinergi melatih generasi muda untuk terampil mengelola keuangan agar menjadi generasi yang mandiri secara finansial, dalam kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) 2025.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersinergi mengajak Pramuka Berkebutuhan Khusus menjadi generasi mandiri secara finansial. Pesan ini disampaikan dalam acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) 2025 yang berlangsung di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta Timur, Kamis 14 Agustus 2025.

Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar bersama Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, pimpinan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK), dan Kwarnas Pramuka secara resmi membuka rangkaian LIKE IT 2025.

Acara ini digelar oleh FK-PPPK dan menjadi bagian dari rangkaian Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus Nasional (PPBK Nas) 2025. Kegiatan ini dihadiri sekitar 3.000 peserta Pramuka Tingkat Penegak dan Pandega, termasuk pelajar penyandang disabilitas, yang menjadi sasaran prioritas edukasi keuangan berdasarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021–2025.

Friderica menegaskan bahwa LIKE IT adalah bentuk kolaborasi *strategis* empat lembaga keuangan negara untuk meningkatkan literasi keuangan sekaligus memperluas basis investor ritel serta menyiapkan generasi muda yang cerdas keuangan.

“Program LIKE IT sejalan dengan Asta Cita pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Literasi keuangan menjadi fondasi penting bagi generasi muda Indonesia untuk tumbuh menjadi SDM unggul, produktif, dan siap menghadapi tantangan global,” ujarnya.

LIKE IT 2025 diselenggarakan

untuk meningkatkan basis investor ritel, melatih generasi muda terampil mengelola keuangan, memperluas pemahaman terhadap produk pasar keuangan, serta mengenalkan alternatif instrumen investasi, sehingga lahir generasi muda yang mandiri finansial, percaya diri, dan siap membangun Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia saat ini mencapai 66,46%, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,51%. Berdasarkan klasifikasi usia, kelompok usia 15–17 tahun memiliki indeks literasi keuangan yang tergolong rendah yakni sebesar 51,68%.

Dalam kegiatan ini juga digelar *Leaders Insight* yang menghadirkan para pemimpin dari 4 (empat) lembaga anggota FK-PPPK untuk memotivasi dan mengajak peserta Pramuka untuk mulai merencanakan keuangan dengan menabung dan memanfaatkan produk investasi.

Mahendra menyampaikan bahwa tabungan merupakan salah satu produk keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh para peserta Pramuka dalam merencanakan keuangan masa depan. Kegiatan menabung akan melatih keterampilan keuangan dan membentuk kebiasaan keuangan yang baik sehingga tercipta kesejahteraan finansial.

“Menabung adalah bagian dari nilai kepramukaan yang melatih disiplin, hidup hemat, dan ketangguhan karakter. Fakta bahwa 59 juta pelajar Indonesia telah memiliki tabungan lebih dari Rp32 triliun menunjukkan kebiasaan baik ini tidak hanya memperkuat kemandirian generasi muda, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Mahendra.

OJK juga berupaya untuk memastikan akses yang setara bagi konsumen/calon konsumen penyandang disabilitas. Melalui

Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya (Setara), OJK memastikan seluruh penyelenggara jasa keuangan memberikan akses yang setara bagi difabel untuk dapat menikmati layanan keuangan dengan aman dan nyaman.

Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia (Wamenkeu), Thomas A.M. Djiwandono, memotivasi peserta Pramuka agar berani bermimpi untuk menjadi generasi hebat penerus bangsa. Sebagaimana yang dilakukan pendahulu-pendahulu Indonesia,

“

Menabung adalah bagian dari nilai kepramukaan yang melatih disiplin, hidup hemat, dan ketangguhan karakter. Fakta bahwa 59 juta pelajar Indonesia telah memiliki tabungan lebih dari Rp32 triliun menunjukkan kebiasaan baik ini tidak hanya memperkuat kemandirian generasi muda, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,

”



generasi muda harus bermimpi dan melihat jauh ke depan, kemudian bekerja keras untuk meraih mimpi dan cita-cita tersebut. Wamenkeu Thomas juga mengajak para peserta Pramuka untuk terus menabung dan memanfaatkan uang dengan bijak, agar bisa membantu orang tua dan orang lain, menggerakkan perekonomian, serta membangun negeri.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti mengajak seluruh Pramuka yang hadir untuk selalu menjaga dan merawat Rupiah, yang merupakan simbol kedaulatan negara. "Di BI kita punya program 'Cinta, Bangga, Paham Rupiah'. Uang jangan diremas, dicoret-coret, distapler, atau dibasahi," tegasnya. Ia menambahkan, Rupiah memuat potret pahlawan dari seluruh Indonesia. Hal ini diharapkan menumbuhkan kebanggaan pada pelajar. Destry juga mengajak kaum muda agar paham cara menggunakan Rupiah secara bijak, menghindari pemborosan, serta semangat menabung dan berinvestasi demi masa depan yang lebih baik.

Ketua Dewan Komisiner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan LPS melakukan penjaminan atas simpanan sebanyak Rp2 miliar setiap nasabah dalam setiap bank. Penjaminan Tabungan tersebut perlu memenuhi persyaratan



seperti tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.

“Mulailah dengan mengelola uang secara bijak. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan, biasakan diri untuk menabung secara rutin, dan jangan pernah berhenti belajar tentang cara mengembangkan keuangan. Kami di LPS akan selalu ada untuk memastikan simpanan masyarakat di bank tetap aman,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kwarnas Pramuka, Mayjen TNI (Purn) Bachtiar menyampaikan bahwa menabung tidak hanya untuk memperoleh imbal hasil, tetapi juga memupuk keterampilan keuangan dengan menumbuhkan rasa cinta pada menabung. Oleh karena itu, materi mengenai pengelolaan keuangan masuk menjadi materi dalam Syarat Kecakapan Khusus bagi peserta Pramuka dengan bekerja sama dengan OJK dan institusi perbankan. Syarat Kecakapan Khusus juga memberikan persyaratan yang lebih mudah dan sederhana, serta fitur yang menarik untuk mendorong upaya menabung sejak dini melalui program Simpanan Pelajar (SimPel).

“

Mulailah dengan mengelola uang secara bijak. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan, biasakan diri untuk menabung secara rutin, dan jangan pernah berhenti belajar tentang cara mengembangkan keuangan. Kami di LPS akan selalu ada untuk memastikan simpanan masyarakat di bank tetap aman

”

“Pramuka adalah wadah pembinaan generasi penerus bangsa tanpa membedakan, termasuk bagi adik-adik difabel. Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan nilai gemar menabung yang sejalan dengan semangat Pramuka, agar generasi muda tumbuh disiplin, mandiri, dan berkontribusi bagi kekuatan ekonomi Indonesia,” kata Bachtiar.

Rangkaian acara LIKE IT 2025 diselenggarakan secara bergantian oleh Lembaga anggota FK-PPPK dan dapat menjadi media edukasi bagi generasi muda untuk dapat belajar memahami produk dan layanan keuangan yang aman dan terukur.

Sebagaimana ditambahkan oleh Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar, “Capaian literasi keuangan Indonesia sebesar 66,40% merupakan lompatan besar sekaligus menempatkan kita sejajar dengan negara-negara maju. Namun ke depan, fokus kita adalah meningkatkan kualitas literasi agar masyarakat tidak hanya mengenal produk keuangan, tetapi juga mampu menggunakannya secara bijak serta terlindungi dari risiko pinjaman dan investasi ilegal.”





Cetak Prestasi, Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2025 Naik 5,12%

Ekonomi triwulan II-2025 tumbuh 5,12%, sebuah pencapaian yang melampaui ekspektasi ekonom dan publik. Hasil baik ini, didukung serta oleh peran industri keuangan di tengah ketidakpastian global.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2025 mencapai 5,12% (year-

on-year), melampaui ekspektasi pasar dan lembaga internasional, didorong oleh konsumsi, investasi,

dan ekspor. Angka ini menunjukkan resiliensi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Bagi industri keuangan, pertumbuhan ini berpotensi menciptakan peluang bisnis baru, peningkatan permintaan produk keuangan, dan stabilitas pasar. Sektor keuangan juga memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sektor ini berperan sebagai penyedia dana untuk berbagai kegiatan ekonomi, memfasilitasi akumulasi modal, dan mendorong inovasi teknologi yang pada akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi dan berperan menstabilkan ekonomi.

Meskipun demikian, tantangan eksternal seperti kebijakan perdagangan luar negeri tetap perlu diwaspadai. Bagi para pelaku industri perlu tetap waspada

terhadap tantangan eksternal tersebut serta memastikan kesiapan dalam menghadapi potensi volatilitas di masa depan.

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97% didukung inflasi yang terjaga di 2,18%. Belanja masyarakat meningkat terutama di sektor transportasi, restoran, dan akomodasi, seiring libur sekolah dan hari besar keagamaan yang disertai stimulus pemerintah seperti diskon tarif transportasi dan penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sementara itu dari sisi investasi dalam bentuk aset tetap seperti bangunan, mesin, dan peralatan di suatu wilayah, yang merupakan komponen penting dari Produk

Domestik Bruto (PDB), tercatat ada kenaikan signifikan 6,99%, pertumbuhan tertinggi sejak triwulan II/2021. Investasi bangunan tumbuh 4,89%, sementara investasi mesin melonjak 25,3%. Realisasi investasi langsung mencapai Rp477,7 triliun, didorong pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 30,5% (yoy). Belanja modal pemerintah juga meningkat 30,37%, utamanya pada peralatan dan mesin.

Pertumbuhan ekonomi pada periode ini ditopang oleh peningkatan aktivitas domestik yang masih tumbuh subur. Capaian tersebut juga melampaui ekspektasi sejumlah kalangan yang sempat memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan

II-2025 berada di bawah 5% secara tahunan.

Sektor keuangan memang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara sebagai penyedia dana utama bagi pembiayaan perekonomian. Sektor keuangan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika kapasitas perekonomian mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sementara peningkatan kapasitas ekonomi terjadi jika terdapat investasi baru ke dalam perekonomian. Hampir semua negara berupaya mendorong perkembangan sektor keuangan untuk meningkatkan perekonomian sehingga mampu tumbuh lebih tinggi. Sehingga hasil triwulan kedua tahun ini merupakan kabar gembira bagi perekonomian Indonesia.

Lantas apakah di setiap hasil baik ini selalu dihantui mimpi buruk di masa lalu yakni krisis besar yang pernah kita alami di tahun 1998? Sejumlah ekonom memprediksi melalui analisis indikator-indikator makroekonomi yakni tingkat inflasi, pertumbuhan PDB, kebijakan fiskal pemerintah, dimana probabilitas Indonesia kembali mengalami krisis ekonomi seperti krisis ekonomi 1998 adalah rendah sehingga perekonomian ke depan diproyeksikan cukup stabil.

Beberapa indikator ekonomi belakangan ini menunjukkan tanda yang kurang sehat, misalnya rasio uang beredar terhadap cadangan devisa, defisit anggaran, dan nilai tukar rupiah. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan terulangnya krisis seperti tahun 1998. Karena itu, pelaku pasar kini lebih waspada agar sektor keuangan tetap bisa mendukung stabilitas perekonomian.





Dampak Penurunan BI Rate terhadap Ekonomi Indonesia

Bank Indonesia (BI) resmi menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate pada Agustus 2025. Kebijakan ini membuat BI Rate turun dari 5,25% menjadi 5% setelah beberapa bulan bertahan di level sebelumnya.

BI kembali menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5%. Ini menjadi yang ketiga kalinya BI menurunkan suku bunga setelah sebelumnya Mei BI rate turun menjadi 5,50% dan pada Juli kembali turun ke 5,25%.

Langkah tersebut menjadi perhatian besar karena berdampak langsung pada sektor keuangan dan ekonomi nasional. Penurunan BI Rate biasanya diikuti dengan perubahan bunga kredit perbankan yang bisa mempengaruhi konsumsi masyarakat dan investasi.

BI Rate adalah suku bunga acuan

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter. Instrumen ini menjadi patokan bagi perbankan dalam menentukan bunga pinjaman maupun simpanan. Dengan kata lain, BI Rate sangat berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat, investasi, hingga inflasi.

Penurunan BI Rate pada Agustus 2025 dari 5,25% menjadi 5% dilakukan sebagai respon atas inflasi yang mulai terkendali. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, langkah ini bertujuan agar rasio keuangan tetap sehat serta menghindari persaingan bunga yang kurang sehat.

Bank Indonesia menurunkan BI Rate sebesar 5% dengan proyeksi inflasi 2025–2026 tetap rendah di kisaran 2,5 ±1%. Kebijakan makroprudensial longgar juga diperkuat untuk mendorong penyaluran kredit dan menjaga likuiditas perbankan. Selain itu, BI berkomitmen memperkuat sistem pembayaran digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pengamat perbankan mengatakan penurunan BI Rate yang keempat kalinya sejak awal tahun ini akan mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kredit. Dengan demikian, korporasi dan rumah tangga akan lebih terdorong untuk mengambil pinjaman di perbankan sehingga tingkat konsumsi dapat terdongkrak pada paruh kedua tahun ini. "Pelonggaran suku bunga diharapkan menurunkan biaya pinjaman, memperbaiki kepercayaan bisnis, dan mendorong konsumsi rumah tangga yang sempat tertahan akibat pelemahan daya beli di Semester I," ujarnya.

Lebih lanjut, kredit konsumsi, seperti kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB), serta kredit investasi dan modal kerja, diproyeksikan meningkat karena suku

bunga yang lebih rendah mendorong permintaan kredit. Namun, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada respons pasar. Jika sentimen konsumen dan bisnis masih lemah akibat ketidakpastian global, maka dampak penurunan suku bunga terhadap pertumbuhan kredit mungkin terbatas.

Dampak Bagi Perekonomian Masyarakat Indonesia

Penurunan BI Rate berpotensi mendorong konsumsi masyarakat dan investasi di berbagai sektor. Dengan bunga kredit yang lebih rendah, daya beli meningkat sementara dunia usaha dapat memperluas ekspansi dengan biaya pinjaman yang lebih murah.

Dalam waktu dekat, bunga kredit diperkirakan bisa turun. Ada tiga hal yang mendorong hal tersebut.. Pertama, kondisi likuiditas bank makin longgar sehingga biaya dana jadi lebih

murah. Kedua, persaingan antar bank semakin ketat karena pinjaman tumbuh lambat, sehingga bank menurunkan bunga demi menarik nasabah. Ketiga, ada kemungkinan Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga di akhir 2025 atau awal 2026. Kalau itu terjadi, bunga kredit akan makin tertekan turun. Turunnya BI Rate ini diharapkan bisa mendorong bank lebih berani menyalurkan kredit, sehingga masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah mendapat pembiayaan, dan roda ekonomi bisa bergerak lebih cepat.

Secara keseluruhan, penurunan BI Rate pada Agustus 2025 menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada respons perbankan serta koordinasi kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro.





Sering banyaknya orang yang mulai belajar tentang investasi, sering kali dihadapkan pada istilah-istilah yang sulit dipahami. Salah satunya yang paling umum adalah istilah Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Istilah ini umumnya akan dikenal oleh seseorang yang mulai terjun pada reksa dana atau investasi dana pensiun. Investasi ini sangat diminati kebanyakan investor sebab menawarkan layanan investasi bermodal kecil yang terjangkau oleh semua kalangan masyarakat.

KIK memiliki peran penting dalam aset investasi. Bentuk dari KIK pun beragam bisa dari reksa dana, dana pensiun, atau bentuk lainnya. KIK seringkali menjadi pilihan investasi yang populer karena kemudahan akses, diversifikasi risiko, dan profesionalisme manajemen investasinya.

Secara umum, KIK bisa dipahami sebagai surat perjanjian antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Mengenal Kontrak Investasi Kolektif

Pernahkah mendengar istilah KIK atau Kontrak Investasi Kolektif? Ini adalah istilah yang ditemui ketika kita hendak berinvestasi di sektor reksa dana. Seperti apa KIK, yuk kenali lebih dekat.

Manajer Investasi selaku pihak yang menaungi investor (masyarakat) reksa dana mempunyai wewenang mengelola portofolio investasi kolektif. Sedangkan Bank Kustodian berwenang menjalankan layanan penitipan kolektif. Dengan memahami tentang apa itu KIK, investor bisa memastikan tentang cara kerja reksa dana dan mengoptimalkan imbal hasil selama berinvestasi.

Teknisnya, investor menyetor dana ke dalam suatu wadah (produk investasi, misalnya reksa dana). Lalu, dana tersebut dikelola oleh Manajer Investasi sesuai strategi yang telah disepakati dalam KIK. Kemudian, Bank Kustodian akan bertugas menyimpan dan mengadministrasikan aset atau portofolio investasi tersebut. Nah, KIK ini yang mengatur hak dan kewajiban

kedua pihak, serta cara pengelolaan dana untuk kepentingan pemegang unit penyertaan (investor).

Berdasarkan jenisnya, KIK bisa dibedakan menjadi lima, yakni Penyertaan Terbatas, Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT). Penyertaan Terbatas adalah jenis KIK berupa wadah untuk menghimpun modal investasi investor profesional. Maksud dari investor profesional adalah pemilik modal yang bisa membeli unit penyertaan serta menganalisis risiko reksa dana. Ketika sudah terkumpul, dana tersebut akan dikembangkan oleh Manajer Investasi di portofolio efek maupun portofolio yang berkaitan langsung dengan sebuah proyek, misalnya sektor riil, infrastruktur, maupun sektor lain. Sesuai sebutannya, unit Penyertaan Terbatas hanya ditawarkan pada investor tertentu saja. Dalam kata lain, tak semua pihak bisa mengakses layanan investasi ini.

EBA adalah jenis KIK yang portofolionya berisi aset keuangan. Misalnya, efek utang pemerintah, tagihan *credit card* atau surat berharga komersial, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta jenis aset keuangan lain. KIK EBA tersedia pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam bentuk efek bersifat likuid yang mudah diperjualbelikan oleh investor. KIK EBA memiliki beberapa kelebihan antara lain: bisa menjadi alternatif investasi surat berharga dengan peringkat terbaik, minim risiko, dan tenor panjang dengan kesempatan imbal hasil yang menarik; bisa turut berkontribusi pada pengembangan sektor riil; modal investasi yang diperlukan relatif lebih terjangkau; serta modalnya dikelola secara efisien dan efektif.

DIRE, atau di pasar internasional dikenal sebagai *Real Estate Investment Trust* (REIT), adalah wadah yang menghimpun dana dari investor untuk

diinvestasikan ke dalam aset *real estate* atau aset yang berkaitan dengan properti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Investor memperoleh pendapatan dari kenaikan nilai properti dan/atau hasil sewa properti yang dikelola oleh manajer investasi.

Lalu, DINFRA merupakan wadah investasi kolektif yang menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan pada aset infrastruktur seperti fasilitas fisik, teknis, atau perangkat keras dan lunak yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. DINFRA dikelola oleh manajer investasi dan sebagian besar portofolionya harus diinvestasikan pada aset infrastruktur, baik secara langsung dengan membeli aset

infrastruktur maupun tidak langsung melalui produk investasi perusahaan infrastruktur.

Terakhir, RDPT adalah wadah investasi yang menghimpun dana dari investor profesional dan menginvestasikannya pada portofolio efek atau proyek di sektor riil seperti infrastruktur. Perbedaan utamanya dengan DINFRA adalah RDPT hanya ditawarkan kepada investor profesional, bukan masyarakat umum, dan memiliki batas maksimal 50 pemodal. RDPT hanya ditujukan untuk investor profesional, sebab mereka memiliki kemampuan analisis risiko dan kemampuan membeli unit penyertaan yang tinggi.



Perbedaan Pendanaan dari Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura

Bingung bagaimana membedakan perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura? Simak ulasannya berikut ini agar mudah menentukan pilihan lembaga jasa keuangan yang dibutuhkan.



Tidak selamanya berutang atau mengajukan pinjaman dana itu hal yang buruk. Sebaliknya, ada beberapa manfaat utang yang dapat membuat hidup kita menjadi lebih baik. Umumnya, orang mengajukan pinjaman dana atau berutang untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik itu yang bersifat mendesak seperti biaya medis atau perbaikan rumah darurat, maupun kebutuhan jangka panjang seperti investasi, modal usaha, biaya pendidikan, atau kebutuhan pribadi seperti membeli kendaraan dan renovasi

rumah. Hanya saja perlu untuk diingat bahwa kita wajib membayar kembali pinjaman yang kita dapatkan agar tidak merusak riwayat kredit kita.

Pastikan juga kita sudah memahami secara mendalam lembaga-lembaga jasa keuangan yang melayani pengajuan pinjaman dana. Mengapa? Sebab setiap lembaga yang menyediakan layanan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing konsumen yang tentu saja beragam. Ada yang kebutuhannya cocok untuk meminjam di bank, ada pula

di perusahaan pembiayaan, bahkan ada yang lebih cocok meminjam ke perusahaan modal ventura.

Untuk lembaga jasa keuangan seperti bank, mayoritas kita mungkin sudah mengenalnya. Ya, sebab bank adalah lembaga yang paling umum dan sering dipilih untuk mengajukan pinjaman. Lantas bagaimana dengan lembaga jasa keuangan lain seperti perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura yang tak kalah berperan. Yuk, kita kenal lebih jauh dua lembaga jasa keuangan tersebut yang mungkin suatu saat nanti kita butuhkan jasanya.

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang menyediakan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa kepada nasabahnya. Namun, tidak menghimpun dana dari masyarakat seperti bank. Kegiatan usahanya meliputi sewa guna usaha

(*leasing*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Selain itu, perusahaan pembiayaan juga melayani pinjaman untuk pengadaan barang atau jasa dalam aktivitas produksi atau investasi; pinjaman untuk pembiayaan modal kerja; atau untuk pembiayaan multiguna lainnya.

Sementara, perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang memberikan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu. Biasanya perusahaan rintisan atau UMKM yang berisiko tinggi dan kesulitan mendapatkan pinjaman bank atau memenuhi syarat sebagai perusahaan terbuka. Selain pendanaan, perusahaan modal ventura juga sering memberikan bantuan manajemen untuk membantu

perusahaan yang mereka dani dan berkembang.

Perusahaan modal ventura bisa menjadi solusi pembiayaan yang penting bagi ekosistem bisnis, terutama *startup* yang masih dalam tahap pengembangan. Mereka membantu perusahaan tersebut untuk tumbuh dan mencapai skala bisnis yang lebih besar sebelum akhirnya menjadi perusahaan terbuka atau sukses secara mandiri.

Perlu diingat bahwa keduanya juga memiliki risiko masing-masing. Untuk itu, sebelum memutuskan dari mana akan mencari sumber pendanaan, pahami terlebih dahulu masing-masing kekurangan dan kelebihan. Untuk lebih mudah memahami perbedaan keduanya dapat dilihat dalam tabel tertera.

PERBEDAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN VS MODAL VENTURA (DARI SISI KONSUMEN)

ASPEK	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	PERUSAHAAN MODAL VENTURA
Jenis Pendanaan kepada Konsumen	Pinjaman (utang)	Penyertaan modal (bukan utang)
Hubungan Hukum	Debitur – Kreditur	Mitra usaha – Investor
Jaminan/Agunan	Biasanya wajib ada agunan/jaminan fisik	Bisa tanpa agunan, lebih menilai potensi usaha
Cicilan/Bunga	Ada cicilan pokok dan bunga tetap atau variabel	Tidak ada cicilan, imbal hasil dari bagi hasil atau dividen
Sesuai bagi	Konsumen individu atau pelaku usaha yang butuh pembelian aset	UMKM atau <i>startup</i> yang sedang berkembang namun belum bankable
Keterlibatan Usaha	Tidak terlibat dalam operasional usaha	Bisa ikut terlibat dalam pengembangan dan pengawasan usaha
Risiko Konsumen	Tetap harus bayar cicilan meski usaha merugi	Risiko ditanggung bersama (belum tentu bayar jika usaha gagal)
Contoh Produk	Kredit kendaraan, pembiayaan alat berat, <i>leasing</i>	Penyertaan saham sementara pada <i>startup</i> , pembiayaan berbagi risiko
Tujuan Utama Konsumen	Memperoleh barang/jasa dengan sistem angsuran	Mencari mitra pendanaan untuk ekspansi atau modal kerja
Regulasi & Pengawasan	Diawasi oleh OJK, berbasis POJK Perusahaan Pembiayaan	Diawasi oleh OJK, berbasis POJK Modal Ventura



SYAFIF 2025 Goes to Bandung

Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan hasil positif. Melalui kegiatan *Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes to Bandung*, OJK kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong masyarakat lebih mengenal, memahami, hingga memanfaatkan layanan keuangan berbasis syariah.

Syariah Financial Fair (SYAFIF), pameran jasa keuangan syariah terbesar di Indonesia, kembali digelar di Kota Bandung. Bertempat di Atrium Trans Studio Mall (TSM) Bandung, kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 2–3 Agustus 2025, dengan berbagai agenda seperti *talkshow*, lomba, hiburan, dan *doorprize* menarik.

Acara yang diinisiasi oleh OJK ini bertujuan memperluas akses dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat. Sebanyak 25 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) syariah turut serta dalam pameran, mulai dari perbankan, asuransi,

pasar modal, hingga *fintech*.

Tak sekadar pameran produk, SYAFIF menghadirkan *talkshow* edukatif, lomba anak, pertunjukan seni, serta berbagai *doorprize* menarik. Semua dirancang untuk menarik partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan pengalaman langsung mereka terhadap layanan keuangan syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (KE PEK), Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, OJK secara aktif mendukung komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta

Cita, khususnya menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

Friderica menjelaskan, melalui gelaran SYAFIF ini, OJK ingin membawa keuangan syariah lebih dekat dengan masyarakat melalui pemberian kesempatan untuk mengenal, memahami, dan mencoba langsung produk serta layanan keuangan syariah dalam suasana yang edukatif dan menyenangkan.

Ia menekankan bahwa perlu ada sinergi dua arah, baik dari regulator dan pelaku industri, maupun dari kesiapan

Dengan lebih dari 13.000 pesantren, Jawa Barat memiliki potensi besar dan ditargetkan menjadi provinsi unggulan dalam ajang Adinata Syariah ke depan. Pemerintah Daerah Jawa Barat pun menegaskan dukungannya dengan terus mempererat sinergi bersama OJK, Bank Indonesia, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), dan pelaku industri keuangan syariah untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis syariah.

Dalam acara tersebut, turut hadir pula Kepala Departemen Literasi,

sebanyak 784 rekening dana dan pembiayaan dengan nominal transaksi sebesar Rp73,65 miliar. "Kami berharap, kegiatan ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk terus mendorong pertumbuhan keuangan syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya di Jawa Barat," tutup Darwisman.

Sebagai bagian dari strategi literasi sejak usia dini, OJK meluncurkan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) di Bandung. Program ini menggandeng sejumlah bank syariah untuk memberikan akses perbankan kepada pelajar dan menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah *pilot project* KEJAR tahun 2025.

Lebih lanjut, OJK juga memperkuat implementasi program Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) dengan mengukuhkan agen layanan keuangan syariah berbasis komunitas. Dalam ajang SYAFIF Bandung, dilakukan pengukuhan agen pergadaian dan pembiayaan syariah sebagai wujud realisasi *business matching* sektor pembiayaan, modal ventura, dan lembaga keuangan mikro.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, OJK berharap keuangan syariah dapat tumbuh sebagai ekosistem yang kuat dan inklusif, menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, dan memberi kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional yang adil dan berkelanjutan. OJK berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan serupa di berbagai daerah sebagai bagian dari strategi nasional dalam memperluas akses masyarakat terhadap industri jasa keuangan syariah.



masyarakat sebagai pengguna. Dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, kemitraan, dan keberkahan, Friderica optimistis keuangan syariah dapat menjadi pilar penting pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Perekonomian Setda Jawa Barat, Budi Kurnia, menyampaikan bahwa Bandung adalah lokasi yang strategis untuk pengembangan ekosistem ekonomi syariah nasional.

Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi, Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman, serta Direktur Eksekutif KDEKS Jawa Barat, Diana Sari.

Darwisman menyampaikan bahwa pelaksanaan SYAFIF di Bandung mencatat sejumlah capaian positif, antara lain partisipasi lebih dari seribu pengunjung dalam sesi edukasi keuangan, serta pembukaan akses terhadap produk keuangan syariah



QRIS Tap: Transaksi Keuangan Cepat dan Praktis

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Tap akan menjadi inovasi baru dari sistem pembayaran QRIS. QRIS Tap akan menggunakan teknologi *Near Field Communication (NFC)*. Layanan ini akan dapat digunakan untuk berbagai jenis pembayaran, antara lain transportasi seperti TransJakarta, MRT, KRL dan ritel dengan efisiensi serta keamanan yang tinggi.

QRIS adalah kode QR standar yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk memfasilitasi pembayaran digital di Tanah Air. QRIS memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dengan mudah menggunakan dompet digital atau

mobile banking yang telah terintegrasi dengan QRIS.

Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan proses pembayaran elektronik, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendorong penggunaan teknologi dalam transaksi sehari-hari. Tidak hanya digunakan di Indonesia,

saat ini metode pembayaran menggunakan QRIS juga sudah bisa digunakan di luar negeri, di antaranya di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Di Jepang sudah bisa dilakukan mulai 17 Agustus 2025. Hal itu bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia ke 80. Sementara itu,

transaksi QRIS di China diperkirakan bisa digunakan pada akhir tahun 2025 mendatang. Selanjutnya, QRIS akan bisa digunakan di Arab Saudi agar proses transaksi jamaah Haji dan Umroh bisa lebih mudah.

Pembayaran menggunakan QRIS dilakukan dengan melakukan *scan* pada QR code khusus, yang berbentuk kode matriks dua dimensi terdiri dari tiga pola persegi dan modul hitam. Dilansir dari Kompas.com (6/8/2024), pola pada QR code tersebut menyimpan data karakter, simbol, maupun kode alfanumerik yang membuat transaksi bisa dilakukan dalam hitungan detik saja. Ketika seseorang menggunakan QRIS untuk menyelesaikan transaksi atau pembayaran, dana akan diambil dari dompet digital/*mobile banking* yang terhubung dengan ponsel yang digunakan.

Selain bisa digunakan di sejumlah negara, sekarang konsumen juga bisa menggunakan QRIS Tap. QRIS Tap adalah metode pembayaran berbasis teknologi NFC yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran secara digital tanpa harus memindai atau scan kode QR melalui kamera ponsel.

Fitur ini merupakan pengembangan dari QRIS reguler, yang awalnya hanya bisa digunakan dengan memindai kode QR menggunakan aplikasi *mobile banking* atau *e-wallet*. Dengan QRIS Tap, pengguna tidak perlu lagi memindai kode QR secara manual, cukup menempelkan kartu atau perangkat NFC yang sudah terhubung dengan metode pembayaran digital.

Sebagai inovasi dalam sistem pembayaran digital, QRIS Tap menawarkan nilai lebih baik bagi pengguna maupun *merchant*, berikut adalah sejumlah manfaat yang dapat dinikmati.

Dengan berbagai keunggulan dan manfaatnya, QRIS Tap diharapkan

MANFAAT BAGI PENGGUNA

Bayar lebih cepat: Konsumen semakin praktis saat bertransaksi di berbagai layanan seperti transportasi, ritel, dan rumah sakit.

Contactless: Mengurangi kontak fisik dalam pembayaran, sehingga lebih higienis dan sesuai dengan gaya hidup masa kini setelah pandemi.

Cashless: Tidak perlu membawa uang tunai atau kartu fisik, cukup menggunakan *smartphone*.

MANFAAT BAGI MERCHANT

Terima Transaksi Lebih Cepat: Mempercepat proses pembayaran, mengurangi antrian, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Jangkauan Lebih Banyak Pelanggan: Dengan menyediakan QRIS Tap, dapat menjangkau pelanggan dari beragam pengguna penyedia jasa layanan yang menyediakan fitur ini.

Tingkatkan Keamanan Transaksi: QRIS Tap memanfaatkan teknologi NFC yang terenkripsi, sehingga dapat menjaga data pelanggan yang dapat menjadi nilai plus.

Transparansi & Pencatatan Digital: Setiap transaksi tercatat otomatis di *dashboard merchant*, memudahkan pelaporan, rekonsiliasi, dan analisis data penjualan. Ini mendukung digitalisasi operasional bisnis secara menyeluruh.

dapat semakin mendukung digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia. Seiring dengan semakin luasnya implementasi

teknologi ini, transaksi akan menjadi lebih nyaman, cepat, dan efisien di masa depan.

CARA MENGGUNAKAN QRIS TAP

Qris Tap menggunakan jaringan nirkabel jarak dekat yang menggunakan gelombang radio. Ibaratnya, dengan mendekatkan HP dengan fitur NFC ke perangkat pembayaran *contactless* saja transaksi sudah bisa berlangsung. Lalu bagaimana caranya?

- Pastikan HP baik Iphone maupun Andorid memiliki fitur NFC.
- Aktifkan fitur NFC dengan membukakan pengaturan HP atau *setting*. Gulir hingga melihat fitur NFC lalu klik aktifkan.
- Buka aplikasi *mobile banking*, dompet digital, atau aplikasi pembayaran lain yang mendukung QRIS.
- Pastikan terlebih dulu NFC sudah *on* lalu menu QRIS, lalu pilih fitur "QRIS Tap".
- Pilih sumber dana.
- Setelah itu masukan PIN untuk mengonfirmasi transaksi.
- Dekatkan ponsel ke terminal pembayaran *contactless* di *merchant*
- Transaksi selesai.

Dengan menggunakan QRIS Tab maka akan menghemat lebih banyak waktu untuk pembayaran karena hanya membutuhkan 0,3 detik saja. Hal ini dinilai memudahkan apalagi ketika antrian pembayaran sedang panjang.



Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Indonesia Tunjukkan Perannya di ASEAN Treasury Forum

Perkuat kerja sama ekonomi regional di kawasan ASEAN, Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya membentuk ASEAN Treasury Forum (ATF) sebagai sarana spesifik untuk mencapai dan mendukung integrasi ekonomi di kawasan ASEAN, yang menjadi tujuan utama MEA.

Diiniasi sebagai forum yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih stabil dan terintegrasi di kawasan ASEAN. Indonesia memperkuat peran strategisnya dalam kerja sama perbendaharaan kawasan Asia Tenggara melalui keikutsertaan aktif pada The 2nd ATF Meeting 2025 yang digelar di Putrajaya, Malaysia pada 7-8 Agustus 2025. Bertindak sebagai *Chair* bersama tuan rumah Malaysia, Indonesia memimpin forum yang membahas capaian dan tantangan pengelolaan keuangan publik di kawasan.

ATF adalah forum kerja sama negara-negara ASEAN yang bertujuan memperkuat pengelolaan keuangan publik dan perbendaharaan negara. Forum ini berfungsi sebagai wadah berbagi pengalaman dan praktik terbaik, khususnya dalam pengelolaan kas, akuntansi, pelaporan, serta digitalisasi keuangan negara. ATF dibentuk untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan mendorong transformasi sistem perbendaharaan di kawasan ASEAN, sekaligus mendukung integrasi ekonomi dan stabilitas regional jangka panjang.

Pada penyelenggaraan yang kedua, ATF membahas isu-isu teknis melalui *Technical Level Discussion – Working Group* (TLD-WG). Beberapa kelompok kerja yang terlibat antara lain:

1. *Public Expenditure Management* (PEM): membahas digitalisasi penyaluran bantuan sosial dan integrasi basis data agar penyaluran lebih tepat sasaran, efisien, dan akuntabel.

2. *Government Cash Management* (GCM): Fokus pada optimalisasi Treasury Single Account (TSA) untuk mengurangi dana menganggur dan meningkatkan transparansi.
3. *Government Accounting & Reporting* (GAR): Membahas peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.
4. *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS): menyoroti digitalisasi dan integrasi data keuangan publik.

ATF juga menjadi salah satu langkah nyata untuk mewujudkan visi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Melalui penguatan manajemen keuangan publik, forum ini mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik bagi seluruh negara anggota.

Keterkaitan ATF dengan MEA sangat jelas: keduanya sama-sama berfokus pada integrasi ekonomi

regional. Berdasarkan cetak biru MEA 2025, ASEAN telah mencatat berbagai capaian, seperti integrasi pasar yang lebih dalam, peningkatan kerja sama lintas sektor (energi, e-commerce, transportasi, pariwisata), serta terciptanya ekonomi yang lebih kompetitif, inovatif, dan tangguh.

Namun, tantangan masih ada. Kesenjangan pembangunan antar negara anggota menjadi perhatian utama, ditambah dengan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kawasan.

Kendati demikian, terdapat juga prospek yang cerah dalam kerja sama regional ASEAN. Menurut Sekretaris Jenderal ASEAN, Dato Lim Jock Hoi, melalui kerja sama regional yang kuat, ASEAN memiliki potensi untuk menjadi kekuatan ekonomi utama di kawasan Asia Tenggara dan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian global.



Wujudkan Pramuka Mandiri Finansial



Komjen Pol. (Purn.) Drs. Budi Waseso
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Pada Perayaan Hari Pramuka 14 Agustus 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengajak para Pramuka Berkebutuhan Khusus (penyandang disabilitas) sebagai penggiat ekonomi masa depan untuk menjadi mandiri secara finansial.

Edukasi kepada para pelajar dan penyandang disabilitas ini merupakan wujud nyata literasi keuangan yang inklusif, di tengah peran kalangan muda sebagai investor masa depan. Demikian semangat yang diusung pada acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) yang diselenggarakan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta.

Gerakan Pramuka hadir sebagai salah satu solusi strategis untuk membentuk karakter generasi muda yang tangguh, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan yang siap menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Berikut tanggapan Bapak Komjen Pol. (Purn.) Drs. Budi Waseso, selaku Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka 2023-2028 melihat peran Pramuka dalam literasi keuangan bagi generasi muda.

Pramuka sebagai organisasi non formal pembentuk generasi muda Indonesia. Menurut Bapak bagaimana peran Pramuka dalam proses literasi keuangan bagi generasi muda?

Gerakan Pramuka sejak awal berdiri telah memiliki misi membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, bertanggung jawab, tangguh, dan mandiri. Nilai-nilai dasar seperti gotong royong dan kerja keras yang diajarkan melalui kegiatan kepramukaan sejatinya merupakan fondasi penting bagi literasi keuangan. Mengelola keuangan membutuhkan kedisiplinan dan kemampuan menahan diri untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta keberanian untuk merencanakan masa depan dengan bijak. Oleh karena itu, ketika literasi keuangan dipadukan dengan pendidikan karakter di Pramuka, hasilnya adalah generasi muda yang tidak hanya cerdas secara finansial, tetapi juga memiliki integritas dan kesadaran untuk memanfaatkan keuangan dengan penuh tanggung jawab. Pramuka dapat menjadi jembatan antara dunia pendidikan formal dengan kehidupan nyata, sehingga seorang pramuka tidak hanya belajar cara menabung atau berinvestasi, tetapi juga bagaimana membangun mental yang kuat dan kemandirian sejak dini.

Menurut Bapak, bagaimana cara Pramuka mewujudkan mandiri finansial? Apakah program edukasi dari OJK yang telah dilakukan bersama Kwarnas Pramuka dapat mewujudkan mandiri finansial bagi anggota Pramuka?

Kemandirian finansial adalah sebuah proses panjang

yang harus dimulai sejak usia muda. Bagi Pramuka, langkah pertama adalah membiasakan diri menabung dan menggunakan uang dengan bijak. Langkah berikutnya adalah mengenalkan dunia kewirausahaan, karena melalui kewirausahaan seorang Pramuka bisa belajar menghasilkan pendapatan dari kreativitas dan kerja kerasnya sendiri. Program edukasi yang dilakukan OJK bersama Kwarnas merupakan langkah awal yang penting, karena memperkenalkan konsep-konsep keuangan yang inklusif dan aplikatif. Program ini telah memberi bekal bukan hanya pengetahuan, melainkan juga motivasi untuk berani mencoba pada langkah-langkah yang mendorong pada kemandirian finansial. Saya yakin jika program tersebut dijalankan secara konsisten, anggota Pramuka akan tumbuh menjadi generasi yang mandiri dan memiliki daya tahan dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk membekali anggota Pramuka dengan keterampilan dasar pengelolaan keuangan, seperti menabung, berinvestasi sederhana, atau menghindari pinjaman ilegal?

Banyak kegiatan yang bisa dilakukan, salah satunya adalah mengintegrasikan literasi keuangan ke dalam kegiatan perkemahan atau latihan rutin. Misalnya, simulasi pengelolaan keuangan sederhana, atau bahkan mini market simulasi di lingkungan perkemahan yang mengajarkan cara membeli, menjual, dan mengatur keuntungan. Selain itu, pelatihan kewirausahaan sederhana, seperti membuat kerajinan atau mengelola usaha kecil, dapat memberi pengalaman langsung tentang pentingnya pencatatan keuangan. Kampanye tentang bahaya pinjaman ilegal juga perlu dilakukan secara masif di kalangan Pramuka, sehingga mereka tidak mudah terjebak dalam praktik keuangan yang merugikan. Dengan pendekatan edukasi yang kreatif dan menyenangkan, anggota Pramuka akan lebih mudah memahami prinsip dasar pengelolaan keuangan.



Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kegiatan LIKE IT dalam meningkatkan literasi keuangan bagi generasi muda, khususnya bagi para Pramuka Berkebutuhan Khusus?

Saya memandang kegiatan LIKE IT sebagai langkah nyata yang patut diapresiasi. Literasi keuangan tidak boleh hanya menyentuh kalangan tertentu, melainkan harus inklusif dan dapat diakses oleh semua, termasuk Pramuka Berkebutuhan Khusus. Dengan keterlibatan mereka, pesan yang ingin kita sampaikan menjadi lebih kuat: bahwa setiap anak bangsa memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mandiri secara finansial. Kegiatan ini juga menumbuhkan rasa percaya diri bagi mereka untuk terlibat aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Bagi Gerakan Pramuka sendiri, keterlibatan dalam LIKE IT menunjukkan bahwa organisasi kita terbuka, adaptif, dan peduli terhadap semua lapisan masyarakat, sejalan dengan nilai dasar Pramuka yaitu persaudaraan tanpa membeda-bedakan.

Apa pesan Bapak untuk generasi muda Indonesia dalam rangka mewujudkan generasi emas 2045?

Kepada seluruh generasi muda Indonesia, saya ingin menyampaikan pesan sederhana: jadilah pribadi yang berani bermimpi, berani berjuang, dan berani bertanggung jawab. Jangan mudah tergoda oleh hal-hal instan, karena keberhasilan sejati datang dari kerja keras dan kesabaran. Bekalilah diri kalian dengan ilmu, keterampilan, dan karakter yang kuat, termasuk kemampuan mengelola keuangan dengan bijak. Ingatlah bahwa masa depan bangsa ada di tangan kalian. Generasi emas 2045 bukan sekadar slogan, melainkan cita-cita yang harus diwujudkan bersama melalui kerja keras, persatuan, dan pengabdian. Saya yakin dengan semangat yang di balut dengan pendidikan kepramukaan, generasi muda Indonesia akan mampu menjadi pemimpin perubahan yang membawa bangsa ini menuju kejayaan.



Atur Mitra Pemasaran, OJK Terbitkan POJK No.13/2025

Masa depan baru bagi instrumen efek. OJK akan izinkan Perantara Pedagang Efek (PPE) dan Perusahaan Efek Daerah (PED) bekerja sama dengan pegiat media sosial atau *financial influencer* untuk tujuan promosi.

F*influencer* adalah singkatan dari *financial influencer* atau mitra pemasaran, yaitu individu yang menggunakan media sosial untuk memberikan informasi, saran, dan analisis keuangan kepada khalayaknya. Mereka memengaruhi keputusan keuangan banyak orang, terutama investor muda, dengan konten yang menarik dan mudah dipahami di berbagai platform media sosial.

Begitu berpengaruhnya peran mereka di tengah masyarakat yang beragam level literasi keuangannya,

sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kerugian akibat manipulasi informasi. Karena itulah OJK menerbitkan regulasi khusus yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pengendalian Internal Serta Perilaku Mitra Pemasaran.

Aturan ini ditujukan bagi perusahaan yang menjalankan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) dan atau Perantara Pedagang Efek (PPE), termasuk Perusahaan Efek

Daerah (PED) dan PPE yang berperan sebagai mitra pemasaran. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menjelaskan, tujuan dari aturan ini adalah untuk memperkuat standar tata kelola, mengatasi potensi konflik kepentingan, serta menyesuaikan regulasi dengan kompleksitas industri pasar modal yang terus berkembang, baik dari sisi produk, proses bisnis, maupun teknologi.

Dalam POJK 13/2025 ditetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai PEE dan PPE dan yang berkaitan dengan penerapan berbagai fungsi pengendalian internal, yang masing-masing sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada unit kerja tertentu. Selain itu, kerangka baru tersebut juga menguraikan serangkaian kewajiban dan larangan yang jelas yang akan berlaku untuk masing-masing kegiatan usaha mereka.

Regulasi ini juga menekankan perlunya uji tuntas (*due diligence*) oleh PEE terhadap calon emiten sebelum melakukan penawaran umum. "Selain itu, perusahaan juga diwajibkan mengelola potensi benturan kepentingan secara lebih ketat," kata Ismail.

Aturan ini mencakup delapan hal penting, yaitu:

1. Fungsi wajib PEE yang harus tersedia.
2. Perilaku PEE, termasuk kewajiban, larangan, dan penanganan konflik kepentingan.
3. Fungsi wajib PPE, seperti teknologi informasi dan manajemen risiko TI.
4. Fungsi wajib mitra pemasaran PPE.
5. Fungsi wajib PED.
6. Pembatasan akses pada fungsi tertentu di PEE dan PPE.

7. Aturan alih daya (*outsourcing*) fungsi PPE.
8. Etika perilaku PPE dan PED, termasuk aturan kerja sama iklan dengan *influencer*.

Dalam regulasi ini, OJK juga menetapkan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko teknologi informasi, termasuk kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi. Termasuk pengaturan kerja sama

meningkatkan dan memperkuat aspek perlindungan investor di pasar modal, dari aspek peningkatan kualitas emiten, mitigasi benturan kepentingan dalam penawaran umum, penguatan fungsi-fungsi pada PEE maupun PPE, maupun penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan efek," ujar Ismail.

POJK yang dirilis pada 11 Juni 2025 akan mulai diberlakukan enam



promosi antara perusahaan efek dengan pegiat media sosial (*influencer*), demi memastikan transparansi dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi ke publik.

"Pengaturan terkait pengendalian internal dan perilaku perusahaan efek dalam POJK ini diharapkan dapat

bulan setelahnya, yakni 11 Desember 2025. OJK memastikan akan melakukan pengawasan dan evaluasi berkala agar implementasi aturan ini berjalan efektif serta benar-benar memberikan manfaat bagi investor dan industri pasar modal secara menyeluruh.



Layanan Konsultasi UMKM dari Lembaga Jasa Keuangan

Memiliki peran vital dengan kontribusi besar terhadap PDB dan lapangan kerja, sebagian besar UMKM justru terkendala akses permodalan untuk pengembangan usaha. Mari, kenali lebih dalam layanan konsultasi UMKM dari lembaga jasa keuangan agar lebih memahami prosedurnya.

Memiliki sebuah usaha adalah impian banyak orang. Namun, salah satu tantangan terbesar yang sering dihadapi para pelaku Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah (UMKM) adalah masalah pembiayaan. Padahal pembiayaan dianggap memiliki peran penting untuk mengembangkan usaha. Belum lagi beredarnya informasi yang tidak akurat

atau mitos seputar pembiayaan UMKM seringkali membuat pelaku usaha ragu dan kesulitan dalam mengakses modal yang dibutuhkan.

Di Indonesia beberapa lembaga jasa keuangan sudah menyediakan layanan konsultasi UMKM lengkap yang meliputi bimbingan pengembangan bisnis, bantuan permodalan, pemasaran, dan digitalisasi usaha, serta akses ke jaringan dan informasi bisnis. Contohnya, Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui BSI UMKM Center, BRI melalui Wirausaha Brilliant, BCA dengan program Go Export, BNI juga memiliki program serupa bernama Xpora, dan masih banyak lagi bank-bank yang menyediakan program khusus untuk pelaku UMKM. Selain bank, masyarakat juga bisa mengakses permodalan melalui PNM dengan programnya bernama Mekaar atau ke Pegadaian

melalui program Gadepreneur.

Secara umum, layanan konsultasi UMKM yang disediakan lembaga jasa keuangan tersebut meliputi pengembangan bisnis dimana pelaku usaha akan dibantu menyusun strategi bisnis, perencanaan pemasaran, dan studi kelayakan. Akses permodalan yang membantu pelaku usaha menyusun proposal pengajuan kredit atau pembiayaan. Menyediakan informasi tentang perkembangan teknologi, paten, dan hak cipta.

Pelaku usaha juga difasilitasi pelatihan digital, *e-commerce*, dan digitalisasi transaksi. Termasuk fasilitas legalitas usaha dan sertifikasi halal. Fasilitas lainnya yang juga tersedia dalam layanan konsultasi UMKM adalah akses pasar yakni membantu pelaku usaha memperluas jangkauan

penjualannya hingga ke luar negeri.

Berikut adalah beberapa cara mendapatkan layanan konsultasi untuk UMKM:

1. **Datang Langsung:** Langsung kunjungi bank atau lembaga keuangan yang dipilih..
2. **Akses Digital:** Manfaatkan aplikasi atau platform digital dari bank atau lembaga keuangan terkait.
3. **Telepon:** Jika kesulitan dengan platform digital, hubungi nomor layanan pelanggan untuk bertanya lebih dulu.
4. **Konsultan:** Pelaku usaha juga bisa meminta bantuan dari konsultan pendamping UMKM (misalnya dari lembaga pemerintahan setempat) yang akan membantu berkomunikasi dengan bank atau lembaga keuangan.

Pastikan Anda sudah memahami program-program dan layanan konsultasi yang disediakan setiap lembaga jasa keuangan. Pahami dengan seksama bagaimana administrasi persyaratan pengajuan pembiayaan. Umumnya pelaku UMKM yang kerap dianggap belum *bankable*, kurang paham terhadap produk lembaga keuangan formal. Hal ini, tentu akan menyulitkan pelaku usaha mendapatkan akses permodalan yang dibutuhkan.

Sebelum melakukan pengajuan, pelaku usaha juga dapat menempuh cara meningkatkan literasi keuangan dengan mengikuti program pendampingan yang biasanya digelar oleh beberapa bank-bank besar seperti BRI, Mandiri, dan BNI. Bank-bank tersebut sering bekerja sama dalam program bantuan dan pendampingan UMKM. Program ini seringkali mencakup sesi konsultasi dan dukungan untuk pengembangan usaha Anda.





Investasi Obligasi: Buat Investor yang Cari *Passive Income*

Investasi obligasi menjadi pilihan menarik bagi banyak investor yang mencari pendapatan tetap dan diversifikasi portofolio. Sebagai salah satu instrumen keuangan yang telah lama eksis, obligasi menawarkan berbagai manfaat serta tantangan yang perlu dipahami sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

Obligasi merupakan instrumen investasi berupa surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun pemerintah sebagai bentuk peminjaman uang dan janji untuk membayar kembali sejumlah harga pokok utang beserta bunganya. Obligasi merupakan salah satu instrumen investasi yang memiliki risiko sangat rendah, terutama obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah

karena relatif tidak mungkin gagal bayar dibandingkan dengan perusahaan.

Manfaat utama dari investasi pada instrumen yang satu ini adalah bisa mendapatkan pendapatan pasif dari kupon maupun *capital gain*. Tidak seperti saham ataupun reksa dana, obligasi adalah instrumen yang memiliki jangka waktu baik itu pendek maupun panjang. Ini artinya, *passive income* dari sebuah obligasi akan bisa diperoleh

selama surat utang tersebut belum jatuh tempo.

Obligasi merupakan salah satu instrumen investasi yang memiliki berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko investor. Masing-masing jenis obligasi memiliki karakteristik unik, termasuk kelebihan dan kekurangannya yang perlu dipahami sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

- **Obligasi Pemerintah**

Adalah jenis obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan nasional atau memenuhi kebutuhan pendanaan lainnya. Kelebihan dari Obligasi Pemerintah adalah tingkat keamanannya yang tinggi karena

dijamin oleh pemerintah, sehingga risiko gagal bayar sangat rendah. Selain itu, obligasi ini biasanya menawarkan pengembalian yang stabil dan dapat menjadi komponen penting dalam portofolio investasi yang mengutamakan keamanan. Kekurangannya, imbal hasil Obligasi Pemerintah cenderung lebih rendah dibandingkan obligasi korporasi karena tingkat risiko yang lebih rendah. Hal ini mungkin kurang menarik bagi investor yang mencari pengembalian lebih tinggi.

• **Obligasi Korporasi**

Jenis obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai cara untuk mengumpulkan modal tambahan tanpa harus menerbitkan saham baru. Kelebihan dari Obligasi Korporasi adalah tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan Obligasi Pemerintah, sebagai kompensasi atas risiko yang lebih besar terkait dengan kesehatan finansial perusahaan penerbit. Hal ini memberikan potensi keuntungan yang lebih besar bagi investor. Kekurangannya, risiko gagal bayar lebih tinggi dibandingkan Obligasi Pemerintah, terutama jika perusahaan penerbit mengalami kesulitan finansial. Oleh karena itu, investor perlu melakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi keuangan perusahaan sebelum berinvestasi.

Obligasi menjadi instrumen investasi yang patut dipilih pada dasawarsa ini. Dengan surat utang ini, potensi untuk memperoleh pendapatan pasif sekaligus (dalam beberapa kasus) membantu pemerintah dalam melaksanakan berbagai programnya. Namun sekali lagi, memilih instrumen yang satu ini juga perlu hati-hati dan pertimbangan matang.

CARA MEMBELI OBLIGASI PEMERINTAH

- 1

Registrasi. Registrasi dapat dilakukan setiap saat bahkan sebelum masa penawaran SBN Ritel dibuka. Calon Investor dapat mendaftarkan diri pada sistem elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi (Midis), dengan menginput data-data antara lain, data diri, nomor SID (*Single Investor Identification*), nomor Rekening Dana dan nomor Rekening Surat Berharga. Bagi Calon Investor yang belum memiliki nomor SID, Rekening Dana, dan/ atau Rekening Surat Berharga, dapat menghubungi Midis.
- 2

Pemesanan. Setelah registrasi berhasil, Calon Investor melakukan pemesanan obligasi dengan sebelumnya membaca ketentuan dalam Memorandum Informasi. Pemesanan hanya dapat dilakukan pada saat masa penawaran.
- 3

Pembayaran. Setelah pemesanan diverifikasi (*verified order*), Calon Investor mendapatkan kode pembayaran (*billing code*) melalui email/sms sesuai kebijakan masing-masing Mitra Distribusi. Kode pembayaran digunakan untuk penyetoran dana investasi melalui Bank Persepsi (*teller, ATM, internet banking, mobile banking*)/ Pos/ Lembaga Persepsi Lainnya dalam batas waktu yang ditentukan.
- 4

Konfirmasi. Setelah pembayaran, Calon Investor akan memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan notifikasi *completed order* serta akan memperoleh alokasi obligasi pada tanggal setelmen/ penerbitan.

CARA MEMBELI OBLIGASI KORPORASI

- 1 Sebelum membeli obligasi korporasi, harus tahu peringkat-peringkatnya. Peringkat ini mencerminkan risiko yang terkandung di dalam obligasi tersebut. Peringkat tertinggi adalah peringkat AAA, lalu ada AA+, AA-, BBB. Keempat peringkat tertinggi inilah yang disebut peringkat layak investasi (*investment grade*).
- 2 Buat *Single Investor Identity* (SID) untuk mengidentifikasi identitas investor, *dealer* partisipan atau pihak lain yang terlibat di pasar modal.
- 3 Tentukan jenis obligasi yang ingin dibeli.
- 4 Tentukan tempat pembelian obligasi.
- 5 Tentukan produk obligasi.
- 6 Siapkan dana.
- 7 Bisa membeli obligasi korporasi lewat mekanisme pasar perdana atau pasar sekunder. Tahap awal yang harus dilakukan dalam proses transaksi obligasi adalah memilih perusahaan sekuritas yang memiliki divisi yang menangani pembelian dan penjualan obligasi.

OJK Terima Pertanyaan Legalitas Aset Kripto dan Kredit Usaha Rakyat

Periode 1 Juli – 30 September 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima pertanyaan konsumen mengenai legalitas aset kripto. Seorang konsumen bertanya tentang legalitas produk dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Konsumen ini ingin tahu apakah sebuah Penyedia Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang menawarkan investasi kripto, sudah berizin di OJK. Konsumen mendapatkan penawaran investasi ini dari temannya.

Konsumen juga bertanya mengenai kredit usaha rakyat. Seorang nasabah PUJK mengalami kesulitan ekonomi dan memiliki tunggakan selama empat bulan untuk cicilan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Nasabah tersebut mengajukan permohonan restrukturisasi kredit karena PUJK tersebut sudah tidak lagi memiliki program KUR, sedangkan nasabah tersebut terlambat membayar cicilan selama 4 bulan.

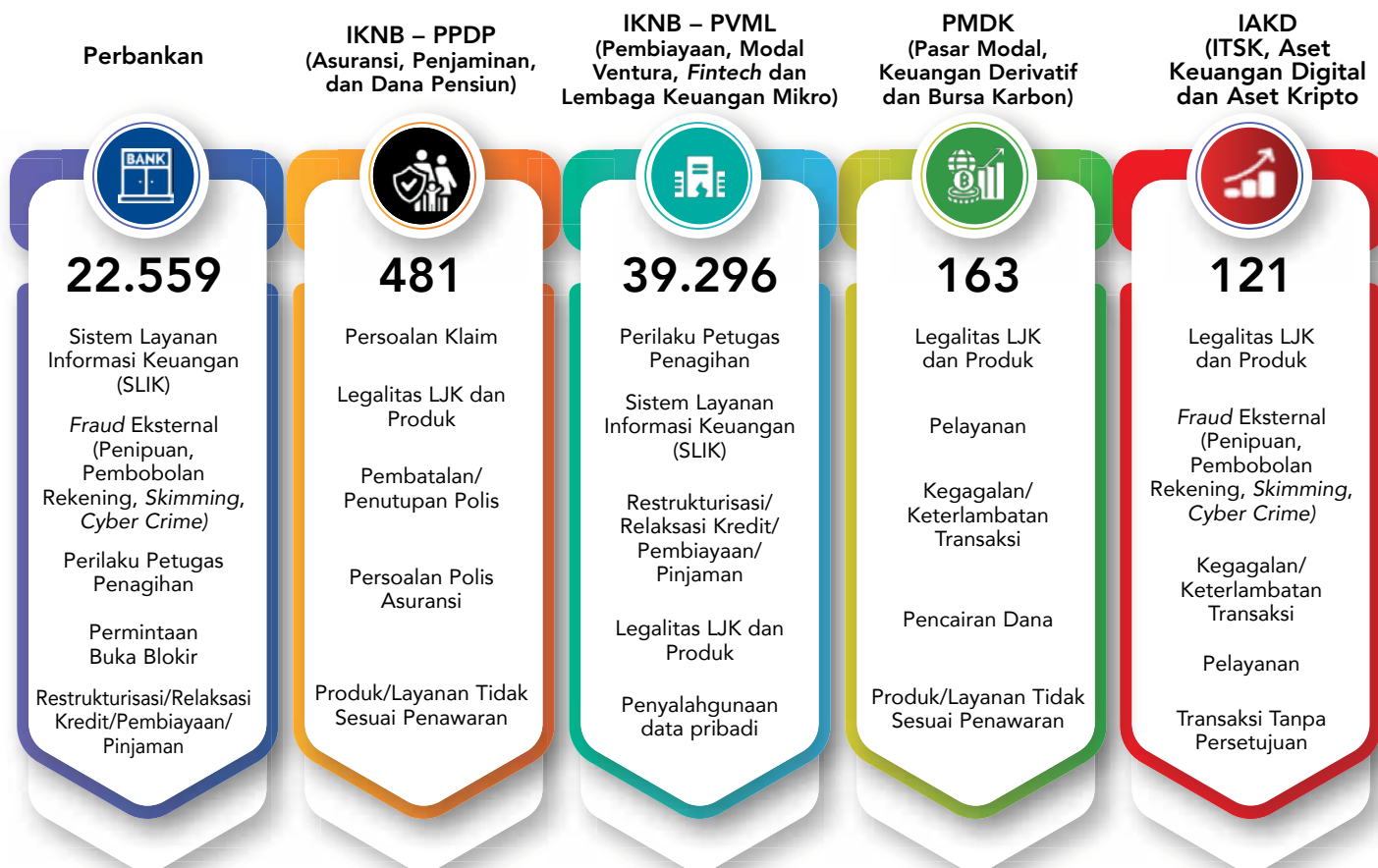
Informasi tersebut Berdasarkan data layanan dari Kontak OJK 157. OJK menerima 78.954 layanan konsumen. Layanan

tersebut terdiri dari 16.334 pengaduan dan 62.620 pertanyaan sektor perbankan, IKNB-PPDP, IKNB-PVML, dan PMDK.

Sebanyak 4.120 merupakan pengaduan bidang pinjaman *online* multiguna, 1.978 mengenai pembayaran angsuran multiguna, dan 1.436 mengenai kredit multiguna. Sebanyak 22.099 pertanyaan mengenai produk pinjaman *online* multiguna, 7.250 pertanyaan mengenai pembayaran angsuran multiguna, dan 7.031 pertanyaan mengenai transfer dana.

Berdasar data di atas, OJK akan terus melakukan tindakan perlindungan konsumen melalui langkah preventif, maupun kuratif. Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) di kontak157.ojk.go.id, Whatsapp 081157157157 dan email konsumen@ojk.go.id. OJK juga akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat pengguna jasa keuangan untuk lebih cermat dan teliti dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Cara ini terus dilakukan agar konsumen di Indonesia terlindungi dengan baik.

Data Layanan dan Kontak OJK Data Pertanyaan Tahun 2025 Periode 1 Juli – 31 September 2025



Di era digital seperti sekarang ini, aset kripto merupakan salah satu tren investasi yang sedang populer di kalangan masyarakat. Namun, sebelum berinvestasi di aset kripto, ada baiknya kita mempelajari dulu tentang apa itu aset kripto, jenis-jenisnya, kelebihan dan kekurangan, serta cara berinvestasi di aset kripto.

Kripto adalah bentuk mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengontrol pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Berbeda

Mengenal Aset Kripto

dengan mata uang tradisional yang dikeluarkan oleh bank sentral, kripto bersifat desentralisasi dan berjalan di atas teknologi *blockchain*. *Blockchain* adalah buku besar digital yang tersebar luas dan transparan, yang mencatat semua transaksi kripto yang pernah terjadi.

Desentralisasi adalah fitur kunci lainnya dari kripto. Tidak ada otoritas pusat yang mengontrol nilainya atau mengatur peredarannya. Nilainya ditentukan oleh algoritma dan konsensus jaringan. Hal ini membuat kripto tahan terhadap manipulasi oleh pemerintah atau lembaga keuangan, dan potensial sebagai alat keuangan yang lebih demokratis.

Namun, penting untuk dicatat bahwa sifat desentralisasi dan kurangnya regulasi juga membawa risiko, termasuk volatilitas harga yang

tinggi dan potensi penggunaan untuk aktivitas ilegal. Meskipun demikian, banyak yang melihat kripto sebagai masa depan keuangan, menawarkan cara yang lebih cepat, murah, dan aman untuk mentransfer nilai di seluruh dunia.

Bitcoin adalah kripto pertama yang diperkenalkan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Sejak itu, ribuan kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan Shiba Inu, telah muncul di pasar.

Minimum investasi di aset kripto tergantung kebijakan dari masing-masing platform *exchange* kripto. Namun, biasanya investasi dapat dimulai dengan kisaran modal Rp5.000 - Rp10.000.

Berinvestasi aset kripto ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain:

KELEBIHAN

- Aset kripto memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat karena harga yang fluktuatif dan volatil.
- Aset kripto bisa diakses oleh siapa saja yang memiliki akses internet dan perangkat elektronik, tanpa memerlukan perantara seperti bank atau lembaga keuangan lainnya.
- Aset kripto juga bisa memberikan penghasilan pasif kepada investor melalui proses *staking*, *lending*, *mining*, dan *farming*.
- Transaksi aset kripto tidak bisa dipalsukan, dibatalkan, atau diubah oleh pihak lain. Transaksi aset kripto juga bisa dilihat dan diverifikasi oleh semua pengguna jaringan.
- Aset kripto juga bisa menjadi salah satu pilihan diversifikasi portofolio investasi yang bisa mengurangi risiko dan meningkatkan imbal hasil.

KEKURANGAN

- Aset kripto memiliki risiko yang lebih tinggi daripada instrumen reksa dana dan saham karena harganya yang sangat fluktuatif.
- Meskipun jaringan *blockchain* sangat aman, tetapi *platform exchange* kripto masih sangat rentan terhadap kejahatan siber.
- Aset kripto masih belum memiliki regulasi yang jelas dan seragam di berbagai negara. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian hukum bagi investor maupun pihak-pihak terkait.

Di Indonesia, OJK telah mengatur dalam POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.

CARA INVESTASI ASET KRIPTO

Tentukan tujuan investasi.

Pilih aset kripto yang akan kamu beli. Misal Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), atau Solana (SOL).

Buat akun di platform investasi aset kripto yang aman dan terpercaya.

Isi saldo ke akun.

Beli aset kripto.

Simpan atau kelola aset kripto sesuai dengan strategi investasi kamu.

ALUR KERJA ASET KRIPTO

01

Pengguna A melakukan permohonan transaksi.

02

Data transaksi tersebut dicatat oleh sistem sebagai sebuah blok. (Blok adalah unit data yang menyimpan informasi terkait transaksi yang terjadi di dalam jaringan Blockchain).

03

Kemudian, blok tersebut akan disebar ke dalam jaringan untuk diverifikasi.

04

Transaksi dianggap valid dan blok tersebut disetujui oleh sistem.

05

Setelah itu, blok baru akan ditambahkan ke dalam rantai blok lainnya

06

Transaksi selesai, penerima B menerima transaksi dari pengguna A. Transaksi aset kripto dilakukan oleh jaringan *peer-to-peer* yang menggunakan teknologi *Blockchain*. Setiap transaksi yang dilakukan harus disetujui oleh sejumlah pengguna yang tergabung dalam jaringan tersebut sebelum ditambahkan ke dalam *Blockchain*.



Kinerja Satgas PASTI Semester I/2025



OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Satgas Waspada Investasi (SWI) sepanjang semester I/2025 telah menemukan dan menghentikan 1.840 entitas keuangan ilegal.

Rinciannya, Satgas PASTI telah menemukan dan menghentikan 1.556 entitas pinjaman *online* (pinjol) ilegal dan 284 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi.

Adapun jumlah pengaduan yang masuk ke sistem Satgas mencapai 11.137 pengaduan, meliputi 8.929 pinjol ilegal dan 2.208 investasi ilegal. "Terdapat 2.422 nomor telepon terkait aktivitas keuangan ilegal dan 22.993 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban *scam*, yang telah diblokir," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, Frederica Widyasari Dewi.

Kemudian, berdasarkan data Indonesia Anti Scam Center (IASC) yang dibentuk oleh Satgas PASTI, angka kerugian akibat penipuan atau *scam* keuangan di Indonesia mencapai hingga Rp4,6 triliun. Angka tersebut merupakan data sejak pembentukan IASC pada November 2024 hingga saat ini.

OJK berkomitmen akan terus melakukan upaya pemberantasan *scam* atau penipuan lewat kolaborasi dengan berbagai pihak. Termasuk juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam penindakan secara hukum pidana.

Tingkatkan Perkembangan Usaha Mikro, Pemerintah Sediakan Program Pembiayaannya

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial terhadap perekonomian Indonesia. Mereka menjadi tulang punggung ekonomi dengan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga berperan dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seдемikian besar peran usaha mikro, pemerintah pun menaruh perhatian besar terhadap perkembangannya dengan menyediakan pembiayaan yang mudah dan terjangkau. Salah satu upaya pemerintah adalah akses pembiayaan melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi), dan program dana bergulir.

Program-program tersebut merupakan program untuk mendukung permodalan usaha kecil dan mikro. Meskipun memiliki tujuan yang sama, ketiga program tersebut memiliki perbedaan signifikan dalam hal target penerima, plafon pinjaman, jangka waktu, dan lembaga penyalur.



KUR adalah fasilitas kredit atau pinjaman modal kerja dan investasi yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro dan kecil, dengan plafon pinjaman yang lebih besar dan jangka waktu lebih panjang, disalurkan melalui perbankan dan lembaga keuangan. Sementara UMi adalah fasilitas pembiayaan yang menasar usaha ultra mikro yang belum *bankable*, dengan plafon lebih kecil dan jangka waktu lebih pendek, disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Kemudian dana bergulir merupakan dana APBN yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) untuk dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat melalui Badan Layanan Umum (BLU) sebagai perkuatan modal bagi UMKM.

Masyarakat dapat berperan sebagai penerima manfaat maupun pendukung keberhasilan program ini. Sebagai penerima manfaat, masyarakat dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional dengan memanfaatkan pembiayaan baik KUR, UMi atau dana bergulir LPDB-KUMKM secara bijak, meningkatkan kapasitas usaha, dan berkolaborasi dengan pihak

terkait (pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas).

Keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada partisipasi aktif dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola dana dan mengembangkan usahanya. Secara keseluruhan, baik KUR, UMi maupun dana bergulir LPDB-KUMKM memberikan manfaat besar bagi perekonomian, terutama bagi pelaku usaha ultra mikro yaitu dengan memfasilitasi akses pembiayaan atau modal usaha sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan secara berkelanjutan.

Kriteria	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)	Dana Bergulir LPDB-KUMKM
Tujuan Utama	Mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan UMKM melalui penyaluran kredit dengan suku bunga rendah.	Memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro yang belum bankable (tidak dapat dijangkau perbankan).	Memberikan bantuan permodalan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
Sumber Dana	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama melalui subsidi bunga dan penjaminan kredit.	APBN, kontribusi pemerintah daerah, dan lembaga keuangan domestik/global. Dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) di bawah Kementerian Keuangan.	Dana bergulir yang dialokasikan oleh kementerian atau lembaga untuk perkuatan modal usaha.
Penyalur	Lembaga perbankan yang telah ditunjuk oleh pemerintah, seperti bank BUMN dan bank swasta.	Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang telah lulus uji kelayakan dari PIP, seperti PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).	Lembaga perantara seperti koperasi dan lembaga keuangan lainnya, yang kemudian menyalurkan dana tersebut kepada anggotanya.
Target Penerima	Pelaku usaha UMKM yang layak usaha (<i>feasible</i>) tetapi tidak memiliki agunan yang memadai (<i>non-bankable</i>).	Pelaku usaha ultra mikro perorangan atau kelompok yang belum bankable.	Koperasi yang telah berbadan hukum, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang layak secara bisnis.
Mekanisme	Pemerintah menyediakan subsidi bunga, sehingga suku bunga yang ditanggung debitur menjadi lebih rendah dari bunga komersial.	Pembiayaan diberikan dengan proses mudah, bunga rendah, tanpa agunan (untuk pembiayaan kelompok), dan dilengkapi pendampingan usaha.	Pengelolaan dana bergulir disalurkan dalam bentuk pinjaman/pembiayaan kepada koperasi dan UMKM dengan bunga yang rendah dibandingkan lembaga keuangan komersial.
Syarat Khusus	Memiliki izin usaha dan memenuhi kriteria UMKM yang disyaratkan. Tidak sedang menerima KUR dari lembaga lain.	Tidak sedang dibiayai oleh lembaga keuangan/koperasi lain, memiliki NIK elektronik, dan memiliki surat keterangan usaha.	Koperasi harus berbadan hukum, telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 tahun berturut-turut, memiliki SHU positif.

Fenomena Rojali dan Rohana: Ketika Belanja Cuma Sekadar Wacana

Menurunnya daya beli masyarakat Indonesia di mal belakangan telah memunculkan istilah baru di media massa. Istilah tersebut yakni Rojali atau rombongan jarang beli dan Rohana atau rombongan hanya nanya. Kendati terkesan lucu, namun fenomena ini menggambarkan perekonomian masyarakat Indonesia sedang tidak prima.

Fenomena “Rojali” alias “rombongan jarang beli” dan “Rohana” atau “rombongan hanya nanya” semakin marak terlihat di mal-mal besar ibu kota. Kelompok pengunjung ini biasanya datang berkelompok, menyusuri deretan etalase, tetapi sering kali tak melakukan transaksi apa pun. Meski demikian, bagi sebagian besar pengunjung, aktivitas ini bukan soal belanja, melainkan cara untuk bersantai, menghibur diri, bahkan riset sebelum membeli barang secara *online*.

Di balik padatnya lalu lalang pengunjung di mal, banyak di antaranya yang sebenarnya hanya sekedar *window shopping*, alias melihat-lihat barang tanpa niat membeli. Belakangan bagi sebagian orang, aktivitas *window shopping* ini bukan sekadar gaya hidup, tetapi juga bentuk adaptasi atas berbagai tekanan ekonomi yang



membayangi, seperti harga barang yang tinggi di toko fisik, minimnya ruang publik yang layak, hingga kebutuhan untuk mencari tempat yang nyaman dan aman di tengah padatnya kota.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, fenomena tersebut sejalan dengan kondisi di tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi yang sedang tidak pasti. Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir, berbagai pihak lebih memilih untuk menimbang-nimbang sebelum membelanjakan dananya.

Mahendra menjelaskan, saat terjadi fenomena menunda belanja di tingkat konsumen, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Namun, ketika sudah ada kepastian dan hasil yang lebih jelas dari kelanjutan ekonomi, maka ekspektasi masyarakat akan sejalan dengan pihak produsen dan investor. Dengan begitu, konsumen akan mulai kembali membuat keputusan belanja ke depannya.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Tommy Kurniawan menilai fenomena Rojali dan Rohana merupakan tanda melemahnya daya beli masyarakat. Ia menilai, fenomena Rojali dan Rohana tersebut harus menjadi alarm yang perlu direspon serius oleh pemerintah. Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat sektor rumah tangga yang merupakan penggerak utama ekonomi nasional. Jelasnya, inovasi dalam pelayanan dan kebijakan ekonomi menjadi penting agar masyarakat kembali bergairah untuk berbelanja.

Seperti penjelasan di atas, fenomena rojali maupun rohana merupakan bentuk penurunan daya beli masyarakat. Pada akhirnya, ini akan menimbulkan dampak yang besar bagi perekonomian, seperti:

1. Turunnya Permintaan Barang dan Jasa



Penurunan daya beli masyarakat akan berdampak langsung pada menurunnya permintaan terhadap barang dan jasa. Barang-barang sekunder atau tersier akan menjadi pilihan terakhir untuk dibeli. Akibatnya, akan banyak sektor usaha mulai merasakan penurunan penjualan. Dalam jangka pendek, ini akan membuat perputaran ekonomi melambat dan tekanan pada pelaku usaha semakin besar.

2. Produksi Menurun dan PHK Meningkat

Ketika permintaan melemah, perusahaan akan menyesuaikan tingkat produksinya. Jika kondisi ini berlangsung lama, perusahaan akan kesulitan menutup biaya operasional termasuk menggaji karyawan. Banyak pelaku industri akhirnya terpaksa merumahkan atau mem-PHK sebagian tenaga kerja sebagai langkah efisiensi. Gelombang PHK ini tentu saja memicu masalah baru, terutama meningkatnya angka pengangguran dan meluasnya tekanan ekonomi rumah tangga.

3. Terganggunya Konsumsi dan Pendapatan UMKM

Ketika tingkat pengangguran meningkat akibat PHK, maka pendapatan masyarakat pun menurun. Hal ini berdampak langsung pada pola konsumsi, terutama terhadap produk-produk dari UMKM yang biasanya bersifat konsumtif dan tidak primer. Akibatnya, pendapatan pelaku UMKM menyusut drastis. Karena sebagian besar UMKM bergantung pada pasar lokal, mereka tidak punya bantalan kuat untuk bertahan dalam tekanan ekonomi seperti ini.

4. Peningkatan Pengangguran dan Penurunan Investasi

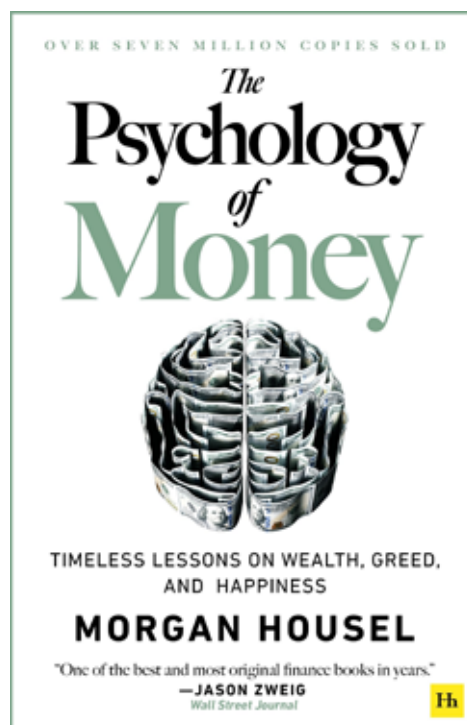
Ketika konsumen menurunkan pengeluarannya, perusahaan mengalami tekanan keuangan. Untuk bertahan, mereka akan memangkas biaya dengan mengurangi tenaga kerja. Peningkatan pengangguran ini semakin memperburuk daya beli, menciptakan lingkaran yang sulit diputus. Selain itu, ketidakpastian ekonomi membuat pelaku bisnis ragu untuk menanamkan modal baru. Penurunan investasi ini tentu berdampak pada pertumbuhan jangka panjang dan bisa memperlambat pemulihan ekonomi secara keseluruhan.

Buku *The Psychology of Money*, Ini Bukan Sekadar Soal Uang!

Sebuah buku yang memberi sudut pandang baru tentang uang dan cara menyikapinya. Menggunakan kisah nyata dan contoh konkret, *The Psychology of Money* menyoroti peran emosi, naluri, dan prasangka dalam pengambilan keputusan keuangan yang seringkali tidak rasional.

Pernahkah kita memikirkan menjadi kaya adalah kebahagiaan sehingga kita mengejar uang dengan memakai segala cara? Ternyata tidak demikian, kekayaan bukan lah masalah *privilege* yang selama ini diyakini oleh banyak orang. Pendidikan yang tinggi serta kedudukan yang bagus memang dapat menjadi faktor seseorang dapat memperoleh kebebasan finansial, namun itu hanya faktor kecil saja, yang memegang peranan penting sebenarnya adalah perilaku kita terhadap uang. Uang berfungsi sebagai alat tukar dan perilaku kita yang benar lah yang bisa membawa kita mencapai kebebasan finansial.

Uang bisa menghadirkan kesejahteraan, tapi di sisi lain bisa juga menghadirkan kesengsaraan. Tergantung dari cara bagaimana kita menyikapinya dan mengelola uang yang kita punya. Dalam buku ini dijelaskan bahwa orang ingin menjadi lebih kaya agar lebih bahagia. "Kebahagiaan adalah subjek rumit karena semua orang berbeda. Namun, jika ada kesamaan umum di kebahagiaan (bahan kebahagiaan universal) itu adalah bahwa orang ingin



memegang kendali atas hidupnya”.

Buku yang terbit 2021 silam tersebut memberi gambaran pada pembaca bahwa kesuksesan dalam mengelola uang tidak selalu tentang apa yang kita ketahui. Ini tentang bagaimana berperilaku dan merupakan perilaku sulit untuk diajarkan, bahkan

kepada orang yang sangat pintar sekalipun. Seorang genius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa mengalami bencana keuangan. Sebaliknya, orang biasa tanpa pendidikan finansial bisa kaya jika mereka punya sejumlah keahlian terkait perilaku yang tak berhubungan dengan ukuran kecerdasan formal.

Buku *The Psychology of Money* memuat 19 cerita pendek yang membahas dan mengupas berbagai hal terkait uang dan aspek-aspek kehidupan. Mengatur uang lebih dari sekadar memikirkan soal kekayaan. Meski kadang perkara uang bisa membuat kita stres dan tertekan, tapi dengan mencoba untuk memahami kebutuhan dan perkembangan dunia dari waktu ke waktu, kita bisa lebih bijak dalam memaknai uang.

Tiap cerita dalam buku ini menghadirkan sudut pandang unik dan menarik terkait uang. Wawasan kita akan diperluas dengan memahami kompleksitas dunia yang kita tinggali, sekaligus membuat kita lebih mudah menerima realitas betapa dinamisnya kehidupan yang kita jalani ini. Kita pun akan disuguhi dengan berbagai data, kasus-kasus penting di dunia perekonomian, pertumbuhan dan perubahan ekonomi dari waktu ke waktu, hingga perspektif soal kebahagiaan. *The Psychology of Money* cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin lebih bijak dan terarah dalam mengatur keuangan hingga bagi yang ingin menemukan makna-makna baru untuk menjalani hidup yang lebih sejahtera.



Carilah kata-kata tersembunyi mendatar/ menurun/diagonal di dalam kotak dengan bantuan gambar-gambar yang tersedia.



UANG



KRIPTO



SAHAM



MENABUNG

Z	K	J	F	D	V	G	E	P	P
H	R	A	R	O	B	E	G	D	H
M	E	N	A	B	U	N	G	J	I
D	D	L	R	O	A	W	E	K	S
L	I	S	G	U	I	M	S	R	H
B	T	R	A	V	I	R	D	I	I
T	A	L	U	H	G	E	R	P	N
A	N	I	L	U	A	N	I	T	G
F	A	D	A	N	A	M	P	O	O
G	E	N	C	A	R	K	A	N	Y



GENCARKAN



PHISHING



KREDIT

Kirimkan jawaban yang tepat dan unggah melalui Instagram Story dan mengirim jawaban melalui Direct Message. Jangan lupa mention @Sikapiuangmu

Dapatkan hadiah menarik bagi 3 orang pemenang kuis!

Menilik Masuknya Dana Pensiun di Indonesia

Dana pensiun adalah salah satu bentuk jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan rasa aman kepada peserta yang telah memasuki usia pensiun atau mengalami risiko lain yang menyebabkan tidak dapat bekerja lagi. Dana pensiun di Indonesia diatur dalam undang-undang no 11 tahun 1992 mengenai Dana Pensiun.



Sejjarah dana pensiun di Indonesia tidak lepas dari perkembangan dana pensiun di tingkat global. Dana pensiun di Indonesia mulai berkembang pada era penjajahan, di mana *Staatsblad* tahun 1926 dan 1934 mengatur dana pensiun untuk pegawai pemerintah. Selain itu, sejak zaman Belanda, sudah ada yayasan-yayasan untuk pegawai swasta, termasuk yang mengelola dana pensiun.

Tahun 1957, pemerintah membentuk Yayasan Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (YDPPNS) sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun bagi pegawai negeri sipil. YDPPNS kemudian berubah nama menjadi Taspen pada tahun 1963. Taspen sebagai Perusahaan Negara (PN) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963. Statusnya

kemudian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) pada 18 November 1970 dan menjadi Perseroan Terbatas (PT) pada 4 Januari 1982. Pada 1 Juli 2015, TASPEN dipercaya mengelola Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Tahun 1977, pemerintah juga membentuk Asabri sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun bagi anggota TNI dan Polri. Pada tahun 1986, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden no 29 tahun 1986 tentang Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang merupakan bagian dari program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Program JHT ini memberikan manfaat pensiun kepada pekerja swasta yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek. Pada tahun 1992, pemerintah mengesahkan undang-undang no 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang mengatur secara lebih rinci mengenai jenis, syarat, pengawasan, dan sanksi terkait dana pensiun di Indonesia.

Kemunculan dana pensiun syariah dimulai dengan berdirinya Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah pada tahun 2017. Berdasarkan skema, dana pensiun syariah dan dana pensiun konvensional secara umum tidak memiliki perbedaan. Hanya saja dalam dana pensiun syariah memakai akad syariah, sedangkan dana pensiun konvensional tidak ada.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan total aset dana pensiun di Indonesia mencapai Rp1.508,21 triliun hingga akhir Desember 2024. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menyampaikan, nilai aset tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 7,31% secara year on year (YoY) atau tahunan.

HATI-HATI TAUTAN JAHAT



LMSKU Challenge 2025

Tantangan untuk mengasah literasi keuangan sebagai bekal penting menuju kemandirian dan kesejahteraan finansial di masa depan.

Kategori Mahasiswa

Peserta merupakan pengguna baru LMSKU yang melakukan registrasi pada periode kegiatan

6-17 Oktober 2025

Pelajar SMA/MA/SMK

Peserta merupakan pengguna baru LMSKU yang melakukan registrasi pada periode kegiatan

3-13 November 2025

Masyarakat Umum

Peserta merupakan pengguna baru LMSKU yang melakukan registrasi pada periode kegiatan

17-27 November 2025

Menangkan hadiah total jutaan rupiah dan bingkisan menarik lainnya...!

Syarat dan Ketentuan selengkapnya di



@sikapiuangmu

